

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN
PERIKANAN BUDIDAYA OLEH DINAS PERIKANAN
DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU
(STUDI DI KELURAHAN LEMBAHSARI KECAMATAN RUMBAI PESISIR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

**ALDIZAN SYAHYADIN
NPM : 147310711**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos. M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pekanbaru beserta staf dan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda Alek Salman (Alm) dan Ibunda Yanti tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan

hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014; terima kasih atas semuanya.

Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon seraoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, November 2021

Penulis Ttd.

Aldizan Syahyadin

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTARTABEL.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	12
A. Studi Kepustakaan.....	12
B. Kerangka Pikir.....	43
C. Konsep Operasional.....	43
D. Operasional Variabel.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Tipe Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Informan.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	53
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	54
A. Gambaran Umum Provinsi Riau.....	54
B. Gambaran Umum Kecamatan Rumbai.....	62
C. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.....	63

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Identitas Responden.....	82
B. Analisis Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir).	84
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)	99
BAB VI PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR KEPUSTAKAAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1	Operasional Variabel Mengenai Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir).. 47
III.1	Jadwal waktu penelitian tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir).... 53

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldizan Syahyadin
NPM : 147310711
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, November 2021
Pelaku Pernyataan,

Aldizan Syahyadin

**PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI PROGRAM BANTUAN
PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA
OLEH DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU
(STUDI DI KELURAHAN LEMBAH SARI KECAMATAN RUMBAL PESISIR)**

ABSTRAK

Oleh

Aldizan Syahyadin

Dilihat dari sektor pertanian, Riau merupakan penghasil ikan yang memenuhi kebutuhan pasar di Pekanbaru. Baik ikan laut, ikan sungai, maupun ikan budidaya. Maka dari itu pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbal Pesisir Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau sangat di perlukan mengingat kebutuhan konsumsi ikan semakin tinggi, karena tingginya minat masyarakat kota pekanbaru untuk mengkonsumsi ikan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, disamping ekonomis, nilai protein yang dimiliki ikan sangatlah tinggi, sehingga baik untuk tumbuh di konsumsi. Untuk itu semakin banyaknya petani ikan, maka semakin tercukupinya kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbal Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, kualitatif dan kuantitatif; Sampel sebanyak 51 orang. Teknik pengumpulan data kuisisioner dan wawancara serta analisis data secara deskriptif, kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbal Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau kurang terlaksana dengan baik. Pengawasan Pemerintah yang dilakukan tim Pengawas belum terlaksana dengan baik di Provinsi Riau berdasarkan jawaban dari informan yang diperoleh dari penelitian dilapangan. Keberhasilan Pelaksanaan suatu Program juga dipengaruhi oleh adanya partisipasi dari masyarakat yang ikut mendukung program-program Pemerintah Daerah Provinsi Riau terhadap usaha perikanan tersebut Adapun yang menjadi faktor-faktor yang menghambat yaitu sebagian besar kawasan perikanan di Provinsi Riau belum dimanfaatkan dengan baik karena pengawasan belum begitu efektif. Dari Dinas Perikanan kurangnya personil pengawas yang diturunkan kelapangan. Kurang maksimalnya biaya atau anggaran untuk biaya pengawasan dari pelaksanaan terhadap usah perikanan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemberdayaan, Petani Ikan

**IMPLEMENTATION OF FARMERS EMPOWERMENT THROUGH THE ASSISTANCE PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL MINA BUSINESS FISHERIES CULTIVATION BY THE RIAU PROVINCE OF FISHERIES AND MARINE SERVICES
(STUDY IN LEMBAHAN SARI SUB-DISTRICT, RUMBAI PESISIR)**

ABSTRACT

By

Aldizan Syahyadin

Viewed from the agricultural sector, Riau is a fish producer that meets the market needs in Pekanbaru. Both sea fish, river fish, and cultured fish. Therefore, the empowerment of fish farmers in the Rumbai Pesisir sub-district by the Fisheries and Marine Service of Riau Province is very necessary considering the higher demand for fish consumption, due to the high interest of the people of Pekanbaru City to consume fish for their daily basic needs, besides being economical, the value of protein possessed by fish is high. very high, so it is good to grow in consumption. For this reason, the more fish farmers, the more fulfilled the needs of the community. The purpose of this study is to identify and explain the implementation of farmer empowerment through the Mina Rural Business Development Assistance Program (PUMP) for Aquaculture in Lembah Sari Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City, Riau Province. The methods used are descriptive, qualitative and quantitative methods; The sample is 51 people. Questionnaire and interview data collection techniques as well as descriptive, qualitative and quantitative data analysis. This study concludes that the Empowerment of Fish Farmers in the District of Rumbai Pesisir by the Department of Fisheries and Marine Affairs of Riau Province is not well implemented. Government supervision carried out by the supervisory team has not been carried out properly in Riau Province based on answers from informants obtained from field research. The success of implementing a program is also influenced by the participation of the community who supports the Riau Provincial Government's programs for the fisheries business. . From the Fisheries Service, there is a lack of supervisory personnel who have been deployed in the field. Less than the maximum cost or budget for the cost of supervision of the implementation of the fishery business.

Keywords: Implementation, Empowerment, Fish Farmers

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang pemerintahannya berbentuk republik, didalamnya terdapat bermacam-macam budaya, ras, etnis, suku, agama, dan sebagainya. Keberagaman tersebut membentuk secara kompleks menjadikan Negara Indonesia menjadi negara kesatuan yang ideologinya adalah pancasila. Hal ini disebabkan karena Indonesia mampu menyatukan keberagaman tersebut menjadi sebuah bangsa dan Negara yaitu bhineka tunggal ika walaupun berbeda tetap satu.

Dalam pemerintahan Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi, setiap daerah/wilayah memiliki beberapa kabupaten/kota dan setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan. Selanjutnya setiap kecamatan terdapat satuan pemerintahan daerah terendah yang disebut kelurahan dan desa. Setiap aktivitas pemerintahan ini dipimpin oleh administrator agar setiap tugas yang ada dapat dijalankan oleh bawahan dengan baik. Tugas seorang administrator adalah mengawasi perjalanan organisasi agar tercapainya tujuan.

Dengan adanya organisasi-organisasi dipemerintahan, yang didukung dengan manajemen yang baik, memudahkan pemerintah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya masing-masing. Agar segala tugas yang ada bisa terlaksana dengan baik. Sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap daerahnya masing-masing.

Seperti halnya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, dinas tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya, berikut tugas pokok dan fungsi dinas perikanan dan kelautan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Bidang Perikanan, membawahi :

1. Seksi Produksi Perikanan
2. Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Perikanan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Berdasarkan fenomena yang ada seksi kelembagaan dan bina usaha yang membawahi pemberdayaan petani ikan yang ada di kecamatan rumbai pesisir. Adapun tugas pokok dan fungsi Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Perikanan, memiliki tugas pokok yaitu :

- a. Menyusun rencana program tahunan seksi.
- b. Menginventarisasi usaha kelompok dan koperasi yang bergerak dibidang perikanan.
- c. Melaksanakan pelayanan dan perizinan usaha, pengawasannya dan memantau sumberdaya perikanan.
- d. Melakukan pemantauan penyediaan lahan ketenagakerjaan dan pemodal.
- e. Melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dibidang masyarakat dibidang perikanan.
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh petani ikan dalam rangka meningkatkan produksi pada musim panen.
- g. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan potensial untuk pengembangan perikanan tangkap, budidaya, dan balai benih ikan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- h. Melaksanakan rekomendasi pengkreditan kepada pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

- i. Memonitoring, evaluasi dan pengawasan pemanfaatan/penggunaan kredit oleh petani ikan.
- j. Melaksanakanyang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana tersebut di atas maka

Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsinya:

- a. Menginventarisasi usaha, kelompok dan koperasi yang bergerak dibidang perikanan.
- b. Pelayanan dan pemberian perizinan usaha, pengawasan dan memantau sumberdaya perikanan, pemantauan penyediaan lahan, ketenagakerjaan dan pemodal.
- c. Melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, pemantauan dan evaluasi terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh petani ikan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan potensial untuk pengembangan perikanan tangkap, budidaya dan balai benih ikan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- e. Pelaksanaan rekomendasi perkreditan kepada pihak perbankan dan kelembagaan yang lainnya, memonitor, evaluasi dan pengawasan pemanfaatan/ penggunaan kredit oleh petani.
- f. Penyusunan program kerja.
- g. Pelaksanaan pelayanan umum.
- h. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya.
- i. Penginventarisasian permasalahan danpenyiapan bahan petunjuk pemecah masalah.
- j. Penyediaan dokumen yang diperlukan pimpinan.
- k. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Pemberdayaan pasti berkaitan dengan pembangunan, pembangunan sejak beberapa terakhir ini banyak di perbincangkan oleh beragam kalangan, baik aparat birokrasi, plitisi, akademi, dam praktisi serta kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dan berkepentingan dengan upaya perbaikan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Maka dari itu pemerintah membuat program pemberdayaan bagi masyarakat agar terciptanya masyarakat yang mandiri.

Pemberdayaan dikenal sejak tahun 1990-an melalui program IDT (Ipres desa tertinggal).pemberdayaan telah menjadi program nasional melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Sehingga tidak satupun SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang tidak memiliki program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan utama administrasi adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban agar masyarakat bisa menjalani kehidupan secara teratur. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok dan fungsi yang mencakup tujuan pelayanan yaitu: mengawasi produksi perikanan, mengadakan pembinaan kepada petani ikan, memberdayakan hasil tangkapan ikan.

Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 4 Lingkup Pengaturan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. Pembiayaan dan pendanaan;
- e. Pengawasan;
- f. Peran serta masyarakat.

Dengan adanya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maka patutnya pemerintah daerah yang menjalankan apa aja yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, misalnya mengawasi, memberikan materi, malindungi, serta membuka peluang informasi bagi masyarakatnya agar tidak bergantung oleh program pemerintah, sehingga menjadikan program pemberdayaan ini menjati program yang berkelanjutan.

Ada pun Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2013 pasal 7, yaitu:

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyuluhan dan pendampingan;
- c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
- d. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
- e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- g. Penguatan Kelembagaan Petani.

Berdasarkan Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan strategi pemberdayaan petani, maka pemerintahan kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan tentang Perizinan Usaha Ikan Pasal 19, yaitu:

1. Pelaksanaan dan pengawasan teknis perikanan terhadap perusahaan perikanan, nelayan dan petani ikan dilakukan oleh kepala dinas perikanan atau pejabat yang ditunjuk.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis perikanan dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa:
 - a. Bimbingan dan pengawasan langsung di lokasi;
 - b. Bimbingan melalui petunjuk tertulis.

Dari peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah kota pekanbaru, maka patutnya kita sama-sama melaksanakan apa yang seharusnya yang akan kita lakukan dalam pemberdayaan petani ikan di kota pekanbaru. Karena masih ada petani ikan tidak mendapatkan pelatihan sehingga minimnya pengetahuan petani-petani tersebut.

Dilihat dari sektor pertanian, Riau merupakan penghasil ikan yang memenuhi kebutuhan pasar di Pekanbaru. Baik ikan laut, ikan sungai, maupun ikan budidaya. Maka dari itu pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai

Pesisir Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau sangat di perlukan mengingat kebutuhan konsumsi ikan semakin tinggi, karena tingginya minat masyarakat kota pekanbaru untuk mengkonsumsi ikan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, disamping ekonomis, nilai protein yang dimiliki ikan sangatlah tinggi, sehingga baik untuk tumbuh di konsumsi. Untuk itu semakin banyaknya petani ikan, maka semakin tercukupinya kebutuhan masyarakat.

Kelurahan Lembah Sari merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Kelurahan ini mempunyai potensi yang baik ditinjau dari segi sektor perikananannya. Bila dilihat dari usaha yang dilakukan oleh masyarakat bsetempat pada umumnya bergerak atau berkecimpung pada sektor perikanan yang bertindak sebagai pembudidaya ikan dan juga dapat dilihat dari banyaknya jumlah ikan yang diproduksi mencapai 57,78 Ton per tahun (Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, 2019).

Di Kelurahan Lembah Sari terdapat pembudidaya ikan, dimana pembudidaya ikan ini melakukan usaha budidaya melalui sistem kolam terpal yang sudah ada sejak tahun 2000. Awalnya pembudidaya ikan ini hanya melakukan kegiatan usaha budidaya ikan dalam bentuk perorangan saja, tetapi setelah adanya program bantuan dari pemerintah di Kelurahan Lembah Sari, pembudidaya ikan ini bergabung menjadi satu untuk membentuk sebuah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang bernama kelompok pembudidaya ikan Mina Jaya.

Pada tahun 2017, khususnya dari Dinas Pertanian Kota Pekanbaru memberikan bantuan PUMP Perikanan Budidaya kepada kelompok pembudidaya

ikan di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Adapun bentuk bantuan yang diberikan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada pokdakan dalam rangka mendukung peningkatan kehidupan pembudidaya ikan sebesar Rp. 65.000.000/kelompok dan memberikan fasilitas penguatan kapasitas dan kelembagaan pokdakan melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan.

Program bantuan PUMP Perikanan Budidaya merupakan program bantuan yang memberikan dorongan kepada pembudidaya ikan agar mau mengubah cara berfikir dan cara hidupnya yang lama dengan cara yang baru, melalui proses penyebaran informasi seperti pelatihan, kursus, kunjungan yang berkaitan dengan perubahan dan perbaikan cara-cara budidaya ikan, usaha peningkatan produktivitas pendapatan pembudidaya serta perbaikan kesejahteraan keluarga pembudidaya ikan.

Perikanan air tawar di Kelurahan Lembah Sari memiliki potensi yang sangat besar untuk masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan keberadaan perairan umum yang dimilikinya, yaitu terdapat Danau Buatan yang berupa bendungan irigasi yang terdapat di sekitar pemukiman penduduk dan memiliki potensi yang sangat besar dalam kegiatan usaha budidaya ikan, karena di daerah ini cukup luasnya lahan yang tersedia untuk dijadikan kolam ikan.

Budidaya ikan di Kelurahan Lembah Sari dikembangkan oleh masyarakat sekitarnya karena menurut mereka dengan usaha budidaya ikan dalam kolam terpal dapat menambah penghasilan mereka. Walaupun demikian produksi perikanan hanya menjadi komoditas sampingan dibandingkan pertanian dan

perkebunan, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang telah menjadikan usaha perikanan sebagai usaha utama untuk menyokong kehidupannya namun itu sangat sedikit.

Kolam-kolam anggota kelompok pembudidaya ikan yang ada di Kelurahan Lembah Sari berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang bervariasi yaitu 6 x 5 m, 7 x 5 m dan 8 x 5 m, sedangkan kolam yang diberikan oleh program bantuan PUMP Perikanan Budidaya yaitu kolam terpal yang berukuran 4 x 6 m. Jenis ikan yang dibudidaya di Kelurahan Lembah Sari adalah Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*). Sistem pemeliharaan yang dilakukan adalah secara monokultur (pemeliharaan ikan dengan satu jenis saja).

Dari hasil observasi, pembudidaya ikan di Kelurahan Lembah Sari memilih membudidayakan ikan Lele dikarenakan jenis ikan tersebut mudah dipelihara, cepat panen dan permintaan pasar akan ikan tersebut cukup tinggi. Penerima program bantuan PUMP Perikanan Budidaya ini terdiri dari berbagai tingkatan umur, pekerjaan dan tingkat pendidikan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pembudidaya dalam mengembangkan usaha budidaya ikan ini. Kegiatan budidaya ikan dalam kolam terpal ini pada umumnya merupakan usaha sampingan bagi pembudidaya, sebagian besar pembudidaya bekerja sebagai petani dan berkebun.

Bantuan ini diberikan bertujuan untuk memberikan contoh ataupun motivasi pada masyarakat di Kelurahan Lembah Sari maupun masyarakat Kelurahan lain agar masyarakat tersebut berkeinginan mengembangkan usaha dalam bidang perikanan, mengingat bahwa bahwa penghasilan dari usaha ini

cukup besar. Selain itu program bantuan PUMP Perikanan Budidaya bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi lahan yang ada untuk budidaya perikanan, menyerap tenaga kerja dan memperluas kesempatan berusaha, mengembangkan kultur kewirausahaan melalui kegiatan pembudidayaan ikan yang dikelola dalam manajemen kelompok secara produktif dan berkelanjutan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Awal berdirinya kelompok budidaya ikan ini adalah atas usaha salah satu seorang masyarakat yang mengajukan proposal pada pemerintah Kota Pekanbaru dalam bidang usaha budidaya ikan, atas usaha dari salah satu masyarakat tersebut pemerintah akhirnya memberikan program bantuan PUMP Perikanan Budidaya kepada masyarakat di Kelurahan Lembah Sari dengan pertimbangan bahwa Kelurahan tersebut layak untuk mendapatkan program bantuan PUMP Perikanan Budidaya. Hal ini juga didukung dengan potensi yang cukup memadai untuk usaha yang diajukan tersebut.

Setelah pemerintah bersedia memberikan program bantuan PUMP Perikanan budidaya maka dikumpulkanlah beberapa orang masyarakat yang ingin membuka usaha budidaya ikan dalam kolam terpal. Masyarakat yang membuka usaha budidaya ikan ini adalah masyarakat yang mempunyai lahan yang layak untuk dijadikan sebagai tempat untuk membuka budidaya ikan kolam terpal.

Suatu program akan menjadi sarana yang baik apabila dilakukan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, tepat perencanaan maupun prosedur. Hal tersebut senada dengan program bantuan PUMP Perikanan Budidaya yang mengedepankan pelaksanaan yang efektif. Pemberian program bantuan PUMP

Perikanan Budidaya ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Pembudidaya ikan yang mendapatkan program bantuan PUMP Perikanan Budidaya dipilih berdasarkan yang membutuhkan bantuan tersebut atau pembudidaya yang kurang mampu yang diajukan dalam bentuk proposal (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, 2019).

Berdasarkan isi proposal yang telah diajukan, pembudidaya ikan memperoleh anggaran bantuan sebesar Rp.65.000.000/kelompok, sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan oleh pembudidaya ikan, dana tersebut dimanfaatkan untuk membuat kegiatan usaha budidaya ikan dalam kolam terpal. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa setiap anggota kelompok pembudidaya ikan di Kelurahan Lembah Sari memperoleh masing-masing 3 kolam terpal berukuran 4 x 6 m², bibit dan jumlah pakan yang sama.

Adapun beberapa fenomena yang di temui dilapangan, yaitu:

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah bagi petani yang akan mengembangkan usaha perikanannya sehingga banyak petani ikan yang terhambat masalah peralatan.
2. Kurangnya materi pembinaan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dan pembinaan yang dilakukan juga tidak dilakukan secara efektif sehingga tidak semua petani ikan yang memperoleh pengetahuan mengenai pemberdayaan perikanan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena dilapangan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu Bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

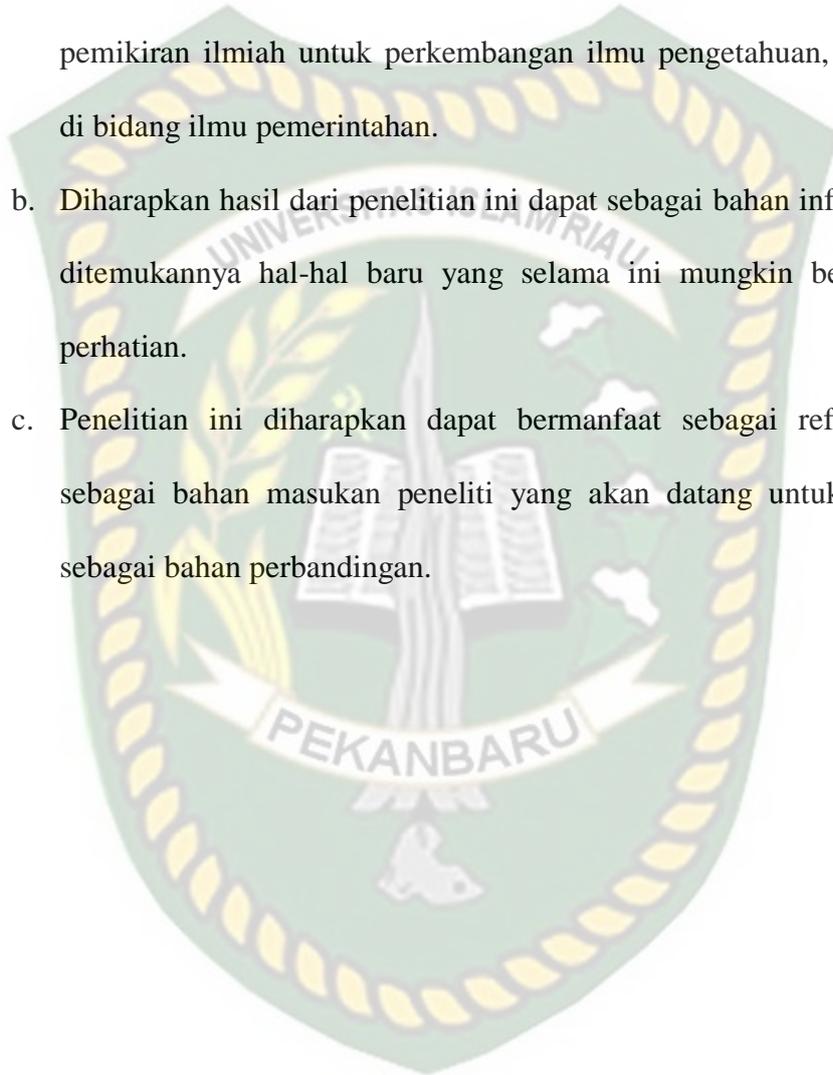
Adapun tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)
2. Untuk mengetahui hambatan - hambatan Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian :

- a. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pemerintahan.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat sebagai bahan informasi dan ditemukannya hal-hal baru yang selama ini mungkin belum dapat perhatian.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan masukan peneliti yang akan datang untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Ndraha (2003:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintah, pada saat dibutuhkan oleh bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya, dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya.

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok (Ndraha, 1997:6)

Menurut Ndraha, (1997:17) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa public dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Selanjutnya Ndraha mengemukakan bahwa pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan

dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000: 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 1999:7).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson

setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Muhadam Labolo:2010,20)

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam

masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005 : 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Ilmu pemerintah adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan

keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis. (Nurcholis,2005 : 112)

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi :“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:“pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahAN. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberpa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

1. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

2. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

4. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagai hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

3. Kebijakan Pemerintahan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002; 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002;20)

Menurut Ndraha (2003;493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat

pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Perbuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003;6)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004;2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008;53) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang

ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008;54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;59) dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Regulatif versus Deregulatif ; kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokatif versus distributif ; kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu ;

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Menurut Easton Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah. Dalam (Lubis, 2007;8)

Sedangkan menurut Nugroho (2004;101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan

untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

4. Konsep Pemberdayaan

Sumaryadi (2005;114) Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi :

- a. Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran dan prestasinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang.
- b. Memperkuat dan daya dan potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif perkembangannya.
- c. Penyediaan berbagai masukan dan pembukuan ke peluang-peluang.

Upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan taraf pendidikan, tingkat kesehatan, modal, teknologi, informasi kerja, pasar, serta fasilitas penunjang aktifitas para petani.

Sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian sebagai berikut:

- a. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam mengorganisir diri dalam kemajuan dan kemandirian bersama.
- b. Perbaikan kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, lemah tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, meningkatkan pendapat pendapatan petani ikan dan meningkatkan usaha-usaha kecil dari berbagai bidang ekonomi.
- c. Di tingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan pendapatan para petani.

Nansy Foy (dalam Sumaryadi 2005;99) pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat saran mereka di dengar untuk memberi kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk meningkatkan kinerja orang tersebut dan kinerja seluruh organisasi, kemudian dia menggambarkan 4 (empat) indikator yang menjadi unsur utama pemberdayaan yang paling berkaitan satu sama lain dengan lainnya sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan itu berfokus kepada kinerja (*performrnce*)
- b. Kinerja yang baik berasal dari tim yang baik (*real teans*)
- c. Pemberdayaan membutuhkan pemimpin yang mempunyai visi (*visible lidership*)
- d. Pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik (*Good Communication*)

Menurut Nining Mardianah dalam Wirutomo dkk (2003;1992) pemberdayaan dimaknai sebagai mendapatkan kekuatan (*power*) dan mengaitkan dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu sistem maupun organisasi. Pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan dalam fikiran masyarakat tentang kemampuan, antisisitem, antistruktur, anti determinisme.

Selanjutnya untuk memahami makna mengenai konsep pemberdayaan, menurut *Tery Wilson* dapat digambarkan dalam tiga tahapan, yaitu:

- a. Pada tingkatan politik dan nasional, pemberdayaan secara perlahan melekat dalam bahasasehari-hari sebagai mekanisme *of self-helf for people* (mekanisme bantuan diri bagi orang lain)
- b. Pada tingkat organisasi, pemberdayaan mempunyai daya tarik untuk mencari gagasan dalam meningkatkan motivasi kerja yang sudah using, seperti *total quality, habitual invrovement, performance*

managemen, self-directed team work, internal customers, competence managemen dan sebagainya.

- c. Pada tingkat individu, pemberdayaan mengarah pada peningkatan keterampilan, status, kepercayaan dan kemampuan diri dalam meningkatkan taraf hidupnya. (sumaryadi. 2005;97-98)

Menurut Wirutomo dkk (2003;133) Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam pemberdayaan, yang sifatnya fleksibel, yaitu:

- a. Persiapan preparation.
- b. Pengembangan kontak dengan klien.
- c. Pengumpulan data dan informasi.
- d. Perencanaan dan analisis.
- e. Bekerja dengan kelompok komunitas.
- f. Pemberdayaan diri dan bersama untuk perubahan yang ingin dicapai.
- g. Monitoring/evaluasi
- h. Kesepakatan bersama

Menurut Mardikanto (2015;100) Pemberdayaan merupakan proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *Stakeholder* (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang berdaya, mandiri, partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Menurut Mardikanto (2015;100) pemberdayaan merupakan proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *stakeholder* (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang berdaya, mandiri, partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Suharto (dalam Mardikanto 2015;170-171) strategi pemberdayaan masyarakat, ia mengemukakan adanya lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat, yaitu:

1. Motivasi

Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan liaknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan.

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

3. Manajemen diri

Setiap kelompok-masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

4. Mobilisasi sumberdaya

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

5. Pembangunan dan pengembangan jejaring.

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses

terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin;

Menurut Totok (2012; 127) tahap-tahap pemberdayaan dapat di bagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Sosialisasi kegiatan;
2. Penyadaran masyarakat;
3. Pengorganisasian masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan;
5. Advokasi kebijakan;

Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Tanpa mengecilkkan arti dan peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis (Totok, 2012;43).

5. Konsep Pembinaan

Pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah dilakukan. Menurut soetopo, H. dan Soemanto, W (1991;43) pembinaan adalah suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada.

Menurut Santoso (2010;139) pembinaan merupakan suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya.

Dari beberapa pengertian pembinaan di atas dapat disimpulkan pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang di lakukan suatu organisasi untuk merubah

kearah yang lebih baik. Yang diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan.

Secara konseptual, pembinaan atau pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin adalah pembinaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat

di mobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pembinaan memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup arah sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Dengan demikian, pembinaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pembinaan kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pembinaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi , maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atau berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu (Toha. 2002;7).

Menurut Santoso (2005;57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain :

- a) Penyuluhan
- b) Pengarahan

c) Bimbingan

Menurut Sumodiningrat (1999;72) Pembinaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pembinaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi :

- a. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap Peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Pembinaan yang dilakukan kemudian mencakup tiga hal pokok yakni kerakyatan, kemampuan sosial politik, dan berkompetensi partisipatif (Suharto. 2004;215). Parson et.al (1994;106) juga mengajukan tiga dimensi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut yang merujuk pada :

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masih menekan.

Lebih lanjut Sedarmayanti menjelaskan, kata pembinaan (empowerment) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pembinaan mengandung dua kecenderungan yaitu :

1. Kecenderungan Primer, proses pembinaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*) proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
2. Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan/keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dari dua kecenderungan diatas memang selain mempengaruhi dimana agar kecenderungan primer dapat terwujud maka harus lebih sering melalui kecenderungan sekunder.

Selanjutnya Tikson dalam Sani (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam proses pembinaan masyarakat yaitu :

1. Pengorganisasian masyarakat

Bidang ini berkenaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian. Masyarakat dapat diorganisasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti organisasi kewilayahan yang luas, organisasi sektoral dan jaringannya atau aliansi dan koalisi. Organisasi-organisasi ini merupakan alat masyarakat untuk menyatakan kehendak mereka dan untuk mempengaruhi proses perubahan yang diinginkan.

2. Penguatan kelembagaan

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan penguatan kemampuan organisasi yang telah ada dengan meningkatkan unsur : pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang ada termasuk didalamnya proses perguliran, manajemen, kemandirian kelompok, norma, dan nilai yang dianut organisasi agar kegiatan kolektif menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam penerapannya penguatan kelembagaan banyak dilakukan melalui pelatihan, keterampilan dan studi banding. Keterampilan dalam hal ini mencakup latihan kepemimpinan, penerapan organisasi dan manajemen keuangan, studi banding dilakukan untuk melihat kelompok di tempat lain yang telah berhasil meningkatkan produktivitas kerja organisasi.

3. Manajemen sumber daya

Kegiatan ini untuk menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya dengan

baik, termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan pengembangan organisasi sosial yang dapat melakukan fungsi pelayanan sosial, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan kegiatan lain yang dianggap perlu. Di samping itu organisasi ekonomi diperlukan untuk memformulasikan berbagai kegiatan ekonomi yang ada menjadi lebih beragam dan luas sehingga dapat memperluas lapangan kerja. Kegiatan konservasi dan rehabilitas lingkungan demi terciptanya pembangunan ekologi dan ekosistem juga menjadi perhatian.

Parson et.al (1994;112-113) menyatakan bahwa proses pembinaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pembinaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien (masyarakat) dalam setting pertolongan perseorangan.

Dalam konteks pekejaan sosial pembinaan dapat dilakukan melalui :

1. Asas Mikro, pembinaan melalui bimbingan tujuannya membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Model yang sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
2. Asas Mezzo, pembinaan dilakukan pada sekelompok klien (masyarakat), metode ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, media intervensi, tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi permasalahan.
3. Asas Makro, pendekatan sistem besar (large system strategy) perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Metode ini memandang kilen sebagai orang memiliki kompetensi.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pembinaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pembinaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya; masyarakat kurang mampu) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hasmaeni dan Riley (dalam Suharto, 2004;218) mengembangkan delapan indikator, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks

pembinaan. Keberhasilan pembinaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu ; kekuasaan di dalam (*power with in*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power within*).

Menurut Wiranto (1999;45), pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pembinaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.

Sejalan dengan itu, Gany (2001) juga berpendapat bahwa konsep pembinaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksi yang ada pada suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pembinaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktivitas pembinaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu :

1. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
2. Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
3. Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.

Oleh karena itu, pembinaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Pembinaan masyarakat juga ditujukan untuk mengikis fenomena kemiskinan.

Suatu pembinaan memiliki ciri-ciri dalam proses penerapannya, adapun ciri-ciri pembinaan menurut Suyono (2007;180) adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam rangka mencapai setinggi-tingginya tingkat kematangan dan tujuan pembinaan.
- b. Prosedur pembinaan dirancang sedemikian rupa agar tujuan yang hendak dicapai terarah.
- c. Pembinaan sebagai pengatur proses belajar harus merancang dan memilih peristiwa yang sesuai dengan anak binaan.
- d. Pembinaan diartikan sebagai usaha menata kondisi yang pantas.

Dalam pengembangan organisasi baik organisasi publik maupun organisasi privat perlu adanya pembinaan yang dilakukan secara terus menerus. Menurut Toha (2003) Pembinaan organisasi adalah suatu yang berencana yang meliputi organisasi secara keseluruhan yang dikelola dari pucuk pemimpin untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang berencana didalam proses organisasi dalam ilmu prilaku.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan pembinaan organisasi merupakan suatu upaya tanggung jawab dari seorang pemimpin sebagai salah satu cara untuk mengembangkan organisasi melalui perencanaan atau proses secara bertahap.

6. Konsep Pelatihan

Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah pelatihan dan pengembangan. dengan kata lain, untuk mendapatkan tenaga kerja yang bersumber daya manusia baik dan tepat, sangat perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan. Hal ini sebagai upaya untuk mempersiapkan para tenaga kerja untuk menghadapi tugas pekerjaan yang dianggap belum menguasainya. Langkah ini dilakukan.

Untuk menghindari kemungkinan terburuk dalam kemampuan dan tanggung jawab bekerja. Sehingga, tenaga kerja dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan efesien. Dalam menyelenggaraan pelatihan bagi karyawan memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit, akan tetapi hal yang diperoleh lebih besar dari pengorbanan,dengan dilaksanakannya pelatihan diharapkan dilaksanakan dengan baik.

Menurut Simamora (dalam Sofian effendi, 2013;2) pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja.

Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pelatihan kinerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos

kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

Gomes (2001) mengemukakan bahwa pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Suapaya efektif pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar (*learning experience*), aktivitas-aktivitas yang terencana (*be a planned organizational activity*) dan didesain sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasi. Secara ideal, pelatihan harus didesain untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi, yang pada waktu yang bersamaan juga mewujudkan tujuan-tujuan dari para pekerja secara perorangan.

Menurut Simamora (2004), pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan, keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja.

Menurut pasal 1 ayat 9 undang-undang no, 13 Tahun 2003 , pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi ,memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kopetensi kerja, produktivitas, disiplin, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

Menurut Handoko (1995), pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan sebagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Jadi, latihan menyiapkan para karyawan (tenaga kerja) untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekarang. Sedangkan, pengembangan

(development) mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian.

Mangkruprawita (2003;135) berpendapat bahwa pelatihan kerja bagi karyawan adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. Sedangkan menurut Veidzal Rivai (2004;291), mengatakan bahwa kinerja (prestasi kerja), pengalaman, pelatihan dan kadang-kadang keberuntungan berpengaruh terhadap pencapaian karir seseorang.

Veidzal Rivai (2006;226), berpendapat bahwa pelatihan sebagai kegiatan dari pendidikan yang menyangkut proses belajar didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori untuk mengubah tingkah laku pegawai sehingga meningkatkan kerja pada saat ini dan kinerja masa mendatang.

Menurut Gomes (2003), pelatihan adalah setiapusaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, Menurutnya istilah pelatihan sering disamakan dengan pengembangan. Perbedaannya, kalau pelatihan berkaitan langsung dengan performansi kerja pada pekerjaan yang sekarang, sedangkan pengembangan tidak harus. Pengembangan mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan pelatihan.

Dari berbagai pendapat diatas disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kepribadian

seseorang yang diperoleh dalam jangka waktu yang relatif lama untuk meningkatkan kinerja seseorang. Sedangkan pelatihan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan teknis operasional dan kemampuan yang spesifik yang dilakukan dalam waktu relatif singkat untuk meningkatkan kinerja dan prestasi seseorang.

Dalam kegiatan penelitian ini, pendidikan dan pelatihan (training) yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap karyawan, sehingga dapat meningkat yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya selama bekerja dalam perusahaan.

Dalam suatu pengembangan sumber daya manusia, maka pelatihan pada pegawai merupakan salah satu factor yang penting baik untuk pegawai yang baru maupun yang telah lama berada didalam instansi yang dimasuki, selanjutnya pegawai harus dikembangkan agar lebih sesuai dengan pekerjaan dalam organisasi. Pelatihan yang dilakukan bukan hanya untuk pegawai yang baru masuk saja, tetapi juga bagi pegawai yang prestasinya mencapai persyaratan atau yang akan dipromosikan dan dimutasikan.

Setiap perusahaan yang menjalankan program pengembangan, dalam hal ini pelatihan bagi karyawan-karyawannya, membutuhkan perumusan yang jelas mengenai pentingnya program pelatihan bagi perkembangan karir karyawan itu pada khususnya dan bagi pencapaian perusahaan pada umumnya.

Secara luas menurut Simamora (1995;228-290), tujuan utama pelatihan itu dikelompokkan kedalam lima bidang, yaitu :

1. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan perubahan teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat efektif menggunakan teknologi-teknologi baru. Perubahan teknologi pada gilirannya berarti bahwa pekerjaan – pekerjaan sering berubah dan gilirannya berarti bahwa pekerjaan-pekerjaan sering berubah dan keahlian serta kemampuan karyawan haruslah memutakhirkan melalui pelatihan, sehingga kemajuan teknologi tersebut secara sukses dapat diintegrasikan ke dalam organisasi.
2. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan. Seringkali karyawan baru tidak memiliki keahlian – keahlian dan kemampuan mencapai hasil (output) dan standar kualitas yang diharapkan. Penyebabnya antara lain :
 - a) Sistem seleksi karyawan yang tidak sempurna, tidak ada alat seleksi yang mampu secara akurat memprediksi kesuksesan dan kegagalan karyawan sepanjang waktu, sehingga, pelatihan seringkali diperlukan untuk mengisi kesenjangan antara kinerja aktualnya.
 - b) Membantu memecahkan permasalahan operasi, meskipun persoalan - persoalan organisasi menyangkut berbagai penjurur, pelatihan adalah salah satu cara terpenting untuk memecahkan banyak dilema yang harus dihadapi, oleh karena itu serangkaian pelatihan dalam berbagai bidang yang diberikan dapat membantu karyawan memecahkan masalah masalah – masalah organisasi untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif.
 - c) Manajemen sengaja mengangkat karyawan – karyawan yang membutuhkan untuk bekerja pada level – level standar, biasanya dilakukan apabila lowongan pekerjaan yang ada melebihi jumlah pelamar.
 - d) Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Selama beberapa hari pertama pada pekerjaan, karyawan baru membentuk kesan pertama mereka terhadap organisasi dan tim manajemen. Kesan ini dapat meliputi kesan menyenangkan sampai pada kesan tidak menyenangkan dan dapat mempengaruhi kepuasan kerja serta hasil produksi. Karena alasan inilah beberapa pelaksana orientasi melakukan upaya bersama untuk secara benar – benar mengorientasikan karyawan – karyawan baru terhadap organisasi dan pekerjaan.

Menurut Carrell dan Kuzmis (1982;278) tujuan utama pelatihan kerja dapat dibagi menjadi 5 area :

1. Untuk meningkatkan keterampilan karyawan sesuai dengan perubahan teknologi.
2. Untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru agar menjadi kompeten.
3. Untuk membantu masalah operasional

4. Untuk menyiapkan karyawan dalam promosi
5. Untuk memberi orientasi karyawan untuk lebih mengenal organisasinya.

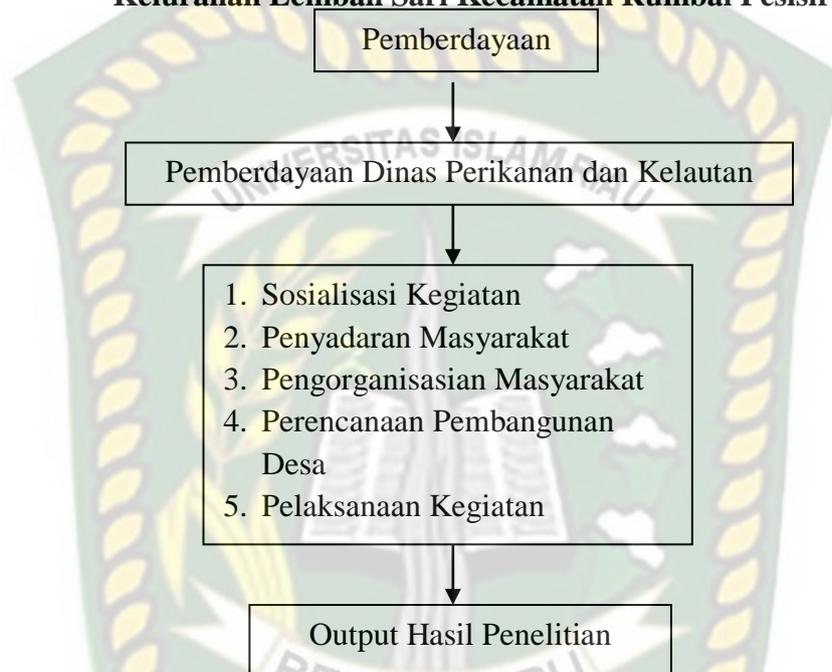
Selain tujuan – tujuan yang telah dijelaskan di atas, program pengembangan dalam hal ini pelatihan, juga mempunyai manfaat yang sangat positif bagi pencapaian tujuan organisasi. Secara umum program ini mempunyai manfaat untuk meningkatkan efektifitas dan produktivitas serta hasil produksi. Pelatihan berperan besar dalam menentukan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi. Beberapa manfaat nyata yang dihubungkan dengan program pelatihan dan pengembangan, Manullang (2010;84) dalam bukunya yang mengutip pendapat proctor dan thorton, adalah sebagai berikut :

1. Menaikkan rasa puas karyawan
2. Pengurangan pemborosan
3. Mengurangi ketidak hadiran dan turn over karyawan
4. Memperbaiki metode dan system kerja
5. Menaikkan tingkat keberhasilan
6. Mengurangi biaya -biaya lembur
7. Mengurangi biaya – biaya pemeliharaan mesin – mesin
8. Mengurangi keluhan karyawan
9. Menimbulkan kerja sama yang baik
10. Memperbaiki moral karyawan

Dari penjelasan diatas, maka jelaslah bahwa program pelatihan ini memberikan suatu keuntungan yang besar nantinya akan dapat dinikmati, baik oleh perusahaan maupun karyawan itu sendiri, sehingga dapat memberikan manfaat dan membantu dalam pencapaian individu dan organisasi.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.I : Model Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

C. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari istilah untuk menganalisis informasi dan data, maka penulis akan memberikan batasan-batasan yang berkaitan dengan pemberdayaan petani ikan kecamatan rumbai pesisir oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, yang berpedoman pada teori-teori yang digunakan sesuai dengan konsep yang ada di daerah penelitian serta masalah yang akan di teliti sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. Pengertian konsep operasional, yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya.

2. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi kegiatan maksudnya yaitu di Kecamatan Rumbai Pesisir apakah ada penyuluhan-penyuluhan dari pemerintahan desa mengenai program-program yang akan dijalankan di desa tersebut.

a) Sosialisasi melalui media masa untuk memberi informasi kepada masyarakat yaitu seharusnya untuk menginformasikan kepada masyarakat desa, pemerintahan desa seharusnya membuat pengumuman melalui media masa agar mudah dijangkau oleh masyarakat.

b) Melalui pertemuan musrenbang guna membahas mengenai pembangunan di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu setiap perencanaan yang akan dijalankan di Kecamatan Rumbai Pesisir seharusnya terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama mengenai perencanaan pembangunan baik fisik dan non fisik.

3. Penyadaran Masyarakat

Penyadaran Masyarakat maksudnya yaitu sebelum menjalankan program-program maka pemerintahan desa harus bisa memberikan dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa arti penting ke ikut sertaan masyarakat dan pembangunan desa.

a) Pemangku kepentingan membuat pertemuan kepada masyarakat maksudnya bahwa perangkat desa harus mampu melakukan pertemuan dan pendekatan kepada masyarakat agar mereka mau ikut serta dalam pembangunan.

b) Pertemuan tokoh masyarakat dan masyarakat guna membahas pemberdayaan masyarakat maksudnya perangkat desa harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan-perencanaan program pembangunan.

4. Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat maksudnya yaitu sebaiknya di Kecamatan Rumbai Pesisir dibuat organisasi-organisasi masyarakat seperti karang taruna remaja agar sebagai pelopor setiap kegiatan.

a) Kepala pemerintahan desa membuat organisasi remaja guna meningkatkan kreatifitas masyarakat maksudnya yaitu keaktifan remaja dimunculkan agar remaja lebih mampu berorganisasi lebih dini.

b) Masyarakat ikut berperan aktif terhadap perkembangan pemberdayaan sumber-sumber daya guna ada di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu selain remaja masyarakat pun sangat besar perannya untuk peningkatan kesejahteraan melalui beberapa program pembangunan.

5. Perencanaan Pembangunan Desa maksudnya adalah membuat rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan, dan perangkat desa berusaha menjalankan program yang direncanakan melalui musrenbang.
6. Pelaksanaan Kegiatan maksudnya yaitu perangkat desa sebaiknya berusaha untuk meralisasikan program-program yang direncanakan.
7. Membuat pelatihan-pelatihan kepada masyarakat supaya terjalin hubungan yang baik antar pemerintah dan masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rumbai Pesisir maksudnya yaitu jalinan hubungan yang baik akan menimbulkan dampak positif juga dan juga akan berdampak kepada masyarakat.

D. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, indikator dan skala yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat, tujuan operasional variabel ini adalah lebih menjelaskan mengenai konsep - konsep utama penelitian ini serta pengelompokkan item penilaian yang mana sebagai batasan – batasan penilaian, maka operasional variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.2 : Operasional Variabel Mengenai Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan atau pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari pihak luar yang sering kali mematikan kemandirian masyarakat setempat. Slamet (dalam Totok	Pemberdayaan pengolahan ikan patin pasca panen oleh UPT Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	1.Sosialisasi Kegiatan 2.Penyadaran Masyarakat 3.Pengorganisasian Masyarakat 4.Indikator Perencanaan Pembangunan 5.Pelaksanaan Kegiatan	a.Sosialisasi melalui media masa untuk memberi informasi kepada masyarakat. b.Pentingnya sosialisasi pemberdayaan a.Pemangku kepentingan membuat pertemuan dengan masyarakat . b.Memberikan pelatihan untuk memperbaiki sumber daya manusia di Kecamatan Rumbai Pesisir a.Desas membuat organisasi remaja guna meningkatkan kreatifitas masyarakat. b.Masyarakat ikut berperan aktif terhadap perkembangan pemberdayaan sumber-sumber daya yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir. a.Melalui pertemuan musrenbang membahas mengenai pembangunan di Kecamatan Rumbai Pesisir. b.Kerjasama dalam pembangunan Desa a.Merealisasikan perencanaan-perencanaan yang telah dibuat.

2012:100)		b.Membuat pelatihan-pelatihan kepada masyarakat supaya terjalin hubungan yang baik antar kepala pemerintahan dan masyarakat Desa.
-----------	--	---

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2020

E. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran terhadap variabel penelitian yaitu, Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir) dan pengukuran terhadap indikator penelitian yakni: 1. Sosialisasi Kegiatan, 2.Penyadaran Masyarakat, 3.Pengorganisasian Masyarakat, 4.Indikator Perencanaan Pembangunan Desa, dan 5.Pelaksanaan Kegiatan.

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator yang diteliti. Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir) adalah 67-100%.

2. Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir) adalah 34-66%.
3. Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir) adalah 1-33%.

Sementara itu ukuran setiap indikator ditetapkan sebagai berikut :

1. Sosialisasi kegiatan

- Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator sosialisasi kegiatan berada pada skala 67-100%.
- Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator sosialisasi kegiatan berada pada skala 34-66%.
- Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator sosialisasi kegiatan berada pada skala 1-33%.

2. Penyadaran masyarakat

- Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penyadaran masyarakat berada pada skala 67-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penyadaran masyarakat berada pada skala 34-66%.

Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penyadaran masyarakat berada pada skala 1-33%.

3. Pengorganisasian masyarakat

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pengorganisasian masyarakat berada pada skala 67-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pengorganisasian masyarakat berada pada skala 34-66%.

Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pengorganisasian masyarakat berada pada skala 1-33%.

4. Perencanaan pembangunan

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator perencanaan pembangunan berada pada skala 67-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator perencanaan pembangunan berada pada skala 34-66%.

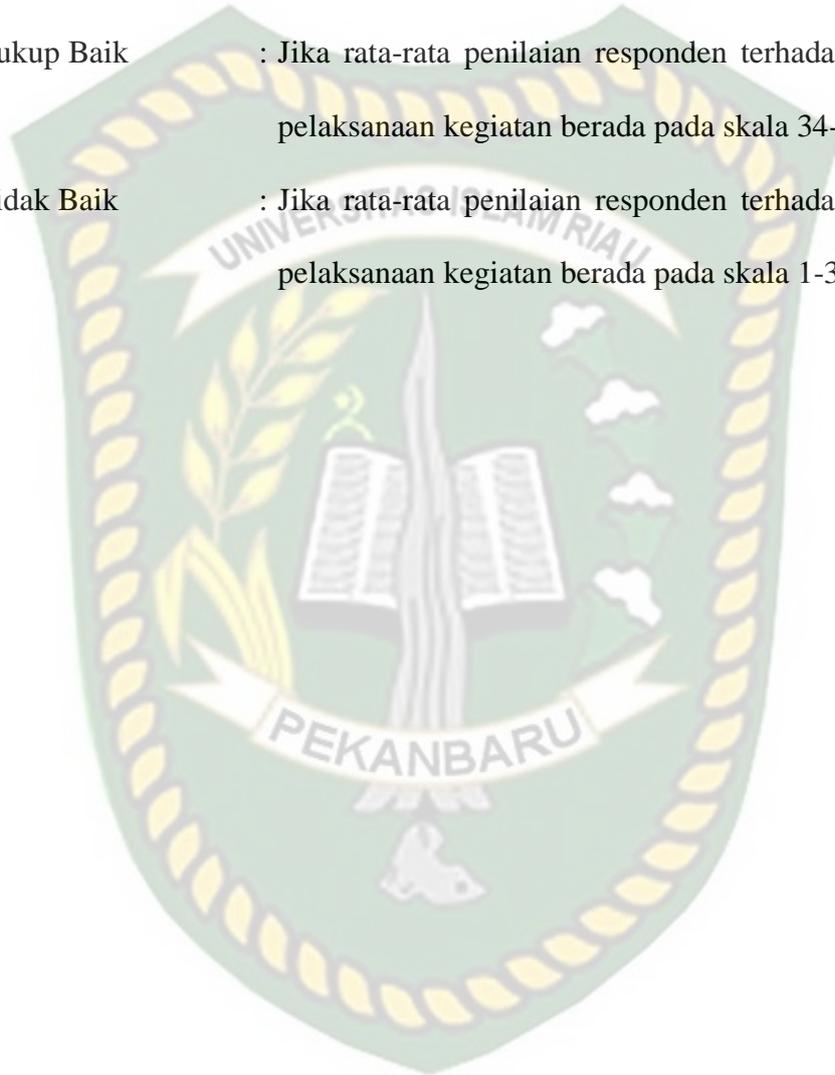
Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator perencanaan pembangunan berada pada skala 1-33%.

5. Pelaksanaan kegiatan

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan kegiatan berada pada skala 67-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan kegiatan berada pada skala 34-66%.

Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan kegiatan berada pada skala 1-33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survey yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung digambarkan dari hasil penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulisan dilapangan dan juga dari jawaban responden tentang Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (dalam Sarwono 2010;33), penelitian kuantitatif digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada waktu tertentu. Melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. Pemilihan Dinas tersebut karena merupakan yang bertugas dan memiliki kewenangan serta kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam Pemberdayaan Petani Ikan Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit analisis atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan jumlahnya. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Table III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel tentang Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau.

No	Jumlah Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	1	1	100%
2	Pegawai Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau	10	10	100%
	Jumlah	11	11	

Sumber : Data Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau 2020

Berikut dapat dilihat populasi dan sampel pada kelompok petani ikan di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru :

Table III.2 : Jumlah Populasi dan Sampel Kelompok Petani Ikan tentang Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau.

No	Nama Kelompok	Populasi (Orang)	Sampel (orang)
1	Mina Patin	18	2
2	Harapan Nelayan	17	2
3	Nelayan Sepakat	13	2
4	Nelayan Bersatu	11	2
5	Berkat Yakin	12	2
6	Tanjung Permai	30	2
7	Rantau Bertuah	29	2
8	Teluk Sakti	12	2
9	Berkah Mina	17	2
10	Nelayan Jaya	11	2
11	Harapan Jaya	17	2
12	Okura Jaya	22	2

1	2	3	4
13	Ukay Jaya	12	2
14	Rasau Sakti	12	2
15	Segar Sari	13	2
16	Nelayan Terpadu	18	2
17	Palas Jaya	12	2
18	Mina Gurami	12	2
19	Parit Belanda	12	2
20	Perikanan Panca Panen	17	2
	Total	327	40

Sumber : *Data Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau 2020*

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun penarikan sampel dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau, penarikan sampel untuk kepala Dinas perikanan dan kelautankota pekanbaru dan petani ikan dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Menurut silalahi (2010;272) purposive sampling yaitu memilih siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

Kemudian penarikan sampel untuk pegawai Perikanan Dan Kelautan Kota Pekanbaru dengan menggunakan teknik sensus. Teknik sensus yaitu seluruh responden dijadikan sebagai sampel.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui daftar pertanyaan dan wawancara yang mencakup terhadap Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berupa arsip, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan yang mengenai pemberdayaan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah:

1. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan informasi, data dan lainnya mengenai pemberdayaan yang ada di kota pekanbaru. Dan juga pengamat secara langsung terhadap hasil pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau.

2. Wawancara

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara wawancara guna melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan kusioner, yang meliputi Pemberdayaan Petani Ikan.

3. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penganalisan secara deskriptif, setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisis dalam dua bentuk. Data yang dibentuk secara kualitatif dan diuraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang berbentuk kualitatif dan ditabulasikan ke dalam tabel.

H. Jadwal Penelitian

Table III.II : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau (Studi Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan up																								
2	Seminar up																								
3	Revisi up																								
4	Revisi quisioner																								
5	Rekomendasi survey																								
6	Survey lapangan																								
7	Analisis data																								
8	Penyusunan laporan hasil penelitian (skripsi)																								
9	Konsultasi revisi skripsi																								
10	Ujian konprehensif																								
11	Revisi skripsi																								
12	Penggandaan skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

1. Keadaan Alam Provinsi Riau

Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas area sebesar 8.915.016 Hektar. Disamping itu didaerah lautan yang berbatasan dengan negara lain diperkirakan luas daerah Zona Ekonomi Eksklusif adalah 379.000 km². Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01⁰05'00'' Lintang Selatan sampai 02⁰25'00'' Lintang Utara atau antara 100⁰00'00'' Bujur Timur sampai 105⁰05'00'' Bujur Timur.

Di daerah daratan terdapat 15 Sungai, diantaranya ada 4 Sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana penghubung seperti Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragili (500 m) dengan kedalaman 6-8 m. ke 4 Sungai yang membelah dari pengunungan dataran tinggi. Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut. Batas-batas Daerah Riau adalah :

- a. Sebelah Utara : Selat Singapura dan Selat Malaka serta Provinsi Sumatra Utara.
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan selat Berhala serta Sumatra Barat.

- c. Sebelah Timur : Laut Cina Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau serta Selat Malaka.
- d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Sumatra Utara Iklim dan Curah Hujan Provinsi Riau

Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1700-4000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Daerah yang paling sering ditimpa hujan selama tahun 2012 adalah Kota Pekanbaru 214 kali, Kabupaten Rokan Hulu 191 hari. Kota Dumai 163 kali, Kabupen Kampar 147 kali dan Kabupaten Kuantan Sengingi dengan jumlah hari hujan 140 kali.

Jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2012 terjadi di Kabupaten Kuantan Sengingi dengan curah hujan sebesar 4.081,0 mm, disusul Kabupaten Kampar sebesar 2.846,1 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1.722,0 mm.

Selanjutnya menurut catatan Stasiun Metereologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru tahun 2012 menunjukkan 26,0 celcius dengan suhu maksimal 35,1 celcius dan suhu minimum 21,8 celcius.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru juga mengeluarkan data jumlah titik api. Pada tahun 2012, jumlah titik api paling banyak terdapat di Kabupaten Palalawan dengan 922 titik api, disusul Kabupaten Rokan Hilir dengan 712 titik api serta Kabupaten Inragiri Hulu dengan 600 titik api. Dan yang paling sedikit di Kota Pekanbaru dengan 9 titik api.

2. Pemerintahan Provinsi Riau

Daerah Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten (Kuatan Sengingi, Indragili Hulu, Indragiri Hilir, Palalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti) dan 2 Kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Tiap Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan Kota oleh seorang Walikota. Dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau pada Juni Tahun 2013 terdapat 164 Kecamatan yang dikepalai oleh seorang Camat dan 1.836 Kelurahan/Desa yang dikepalai oleh Lurah/Kepala Desa. Berikut ini disajikan data mengenai banyaknya Kecamatan dan Kelurahan//Desa menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Tabel 4.1 : Banyak Kecamatan Dan Kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2020

NO	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Kuantan Sengingi	15	229
2	Indragiri Hulu	14	194
3	Indragiri Hilir	20	236
4	Palalawan	12	118
5	Siak	14	131
6	Kampar	21	245
7	Rokan Hulu	16	153
8	Bengkalis	8	155
9	Rokan Hilir	16	183
10	Kepulauan Meranti	9	101
11	Pekanbaru	12	58
12	Dumai	7	33
	Jumlah	164	1836

Sumber BPS Provinsi Riau Dalam Angka 2021

Jumlah Kecamatan yang ada di Provinsi Riau adalah sebanyak 164 Kecamatan dan jumlah Kelurahan/Desa sebanyak 1.836 Kelurahan/Desa. Kabupaten/Kota yang paling banyak Kecamatannya adalah Kabupaten

Kampar dengan 21 Kecamatan. Kabupaten/Kota yang paling sedikit Kecamatannya adalah Kota Dumai dengan jumlah 7 Kecamatan. Sedangkan jumlah Kelurahan/Desa yang paling banyak adalah Kabupaten Kampar dengan jumlah 245 Kelurahan/Desa. Dan selanjutnya jumlah kelurahan/Desa yang paling sedikit adalah Kota Dumai dengan jumlah 33 Kelurahan/Desa.

3. Penduduk dan Perkembangannya

Penduduk Provinsi Riau terdiri dari berbagai suku dan latar belakang sosial, ekonomi, agama serta kebudayaan yang beraneka ragam. Sebagian besar Penduduk Provinsi Riau adalah kaum pendatang yang terdiri dari berbagai suku seperti : Minang kabau, Jawa, Batak, bahkan China dan lain sebagainya.

Penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Dalam usaha meningkatkan produksi dan pengembangan kegiatan ekonomi, penduduk memegang peranan penting di dalamnya. Karena dari penduduk ini tersedianya tenaga kerja, tenaga ahli dan para pengusaha yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Sebagai akibat dari berbagai fungsi ini penduduk bukan saja salah satu faktor produksi, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk mengembangkan teknologi dan mengorganisasikan pengguna faktor produksi. Selain itu penduduk yang banyak merupakan bangsa pasar yang sangat luas untuk memasarkan hasil produksi. Dengan kata lain penduduk memegang peran ganda dalam perekonomian.

Tingkat pengembangan penduduk adalah mutlak untuk diketahui sebagai pedoman dalam rancangan maupun sebagai evaluasi terhadap keberhasilan dan

kegagalan pembangunan. Penduduk Provinsi Riau telah mencapai lebih dari 6.344.402 jiwa tahun 2019, hal ini menunjukkan suatu tingkat penambahan yang pesat, sehingga Provinsi Riau sudah dikategorikan sebagai Provinsi yang berkembang jika ditinjau dari jumlah penduduk dan berdasarkan pada biro pusat statistik Provinsi Riau, jumlah penduduk tahun 2020 laki-laki sebanyak 3.257.561 jiwa, perempuan 3.086.841 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat dari table 3 dibawah ini :

Table 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020

NO	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)
1	Kuantan Sengingi	314. 276
2	Indragiri Hulu	409. 431
3	Indragiri Hilir	703. 734
4	Palalawan	396. 990
5	Siak	440. 841
6	Kampar	793. 005
7	Rokan Hulu	592. 278
8	Bengkalis	543. 987
9	Rokan Hilir	644. 680
10	Kepulauan Meranti	181. 095
11	Pekanbaru	1. 038 .118
12	Dumai	285. 967
	Jumlah	6. 344 .402

Sumber: BPS Provinsi Riau Dalam Angka Tahun 2021

Dari table 4.2. diatas dapat dilihat Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya terbesar adalah kota Pekanbaru yaitu sebanyak 1 038 118 jiwa dan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Meranti yaitu sebesar 181 095 jiwa. Sebagaimana perkembangan penduduk, penyebaran menurut pembagian wilayah Kabupaten juga berubah beserta kepadatannya. Karena luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten tidak sama maka ada

Kabupaten yang padat dan ada yang jarang penduduknya. Dalam populasi itu dinamakan penduduk, bahkan dalam suatu keluarga ada perubahan jumlah penduduk. Perubahan penduduk inilah, karena pertambahan menyebabkan akibat-akibat yang menyangkut segi fasilitas kehidupan dan segi sosial ekonomi.

4. Struktur Umur Pertumbuhan Penduduk

Peranan angkatan kerja dalam perekonomian suatu daerah berkaitan erat dengan jumlah penduduk usia kerja. Kemudian jika kita melihat struktur umur penduduk Provinsi Riau menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:

Table 4.3 : Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Riau pada tahun 2020

NO	Kelompok umur (Tahun)	Penduduk (jiwa)
1	0-4	694.996
2	5-9	668.127
3	10-14	602.901
4	15-19	532.374
5	20-24	553.881
6	25-29	603.314
7	30-34	540.065
8	35-39	408.313
9	40-44	378.030
10	45-49	286.182
11	50-54	218.108
12	55-59	143.891
13	60-64	90.716
14	65-69	62.805
15	70-74	42.375
16	75+	433.112
Jumlah		6.657.911

Sumber: BPS Provinsi Riau Dalam Angka, 2021

Stuktur umur penduduk di suatu daerah menentukan dalam proses ekonomi dimana menurut para ahli kependudukan bahwa penduduk usia 0-4 tahun ditambah dengan penduduk usia 60 tahun keatas digolongkan pada

penduduk tidak produktif yang artinya kelompok umur yang menjadi beban tanggungan kelompok umur produktif (15-59). Angka yang menunjukkan perbandingan antara penduduk yang tidak produktif dengan penduduk yang produktif disebut dengan angka beban tanggungan.

5. Penduduk Menurut Mata Pencarian

Masalah kependudukan selalu berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti dengan peyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan masalah pengangguran dan setengah pengangguran. Sesuai dengan ritme kehidupan masyarakat yang dinamis, maka dalam hal lapangan usaha yang digeluti terhadap keanekaragaman.

Keanekaragaman dalam lapangan usaha inilah yang mengerakan aktifitas ekonomi yang ada dimasyarakat, begitu juga halnya yang terjadi pada Provinsi Riau. Masyarakatnya mengeluti berbagai bidang usaha dalam menjalankan kehidupan antara lain sektor pertanian, pertambangan industri, gas dan air, kontruksi, perdagangan, komunikasi, keuangan dan jasa lainnya. Keanekaragaman lapangan usaha ini yang akan memberikan altenatif pilihan yang lebih banyak bagi masyarakat untuk lebih berusaha dalam rangka mendapatkan pendapatan yang nantinya digunakan dalam kehidupannya.

Beranekaragaman lapangan usaha yang ada di Provinsi Riau ini disadari karena adanya potensial dari Provinsi Riau itu sendiri yang mempunyai kemampuan dibidang ekonomi dan sumber daya alam. Sehingga

kegiatan ekonomi masyarakat hanya terpaku dalam satu bidang usaha yang dominan. Masyarakat sendiri dalam menjalankan kegiatan usaha ini, diharapkan adanya skill, manajemen serta tenaga usahawan yang terampil, agar aktifitas lapangan usaha yang merupakan mata pencarian biasa terlaksana dengan optimal, efektif dan efisien. Sehingga nantinya akan memberikan hasil yang juga maksimum, yang tentu dapat mendukung kegiatan ekonomi Provinsi Riau secara keseluruhan.

Sejalan dengan pertambahan penduduk Provinsi Riau yang cukup tinggi dari tahun ke tahunnya, secara proposional telah meningkatkan jumlah angkatan kerja. Secara keseluruhan lapangan usaha yang diguluti oleh masyarakat Provinsi Riau sebagai lapangan kerja dalam mencari nafkah dapat dilihatnya dalam table berikut :

Tabel 4.4 : Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Berkerja Menurut Lapangan Usaha di Provisi Riau Tahun 2020

NO	Lapangan Usaha	Persentase (%)
1	Angkatan dan Komunikasi	2,90
2	Bangunan dan Kontruksi	5,10
3	Industri Pengolahan	6,10
4	Jasa-Jasa	14,30
5	Keuangan dan Asuransi	2,90
6	Listrik, Air dan Gas	0,30
7	Perdagangan , Rumah Makan dan hotel	20,50
8	Pertambangan dan penggalian	1,90
9	Pertanian	44,70
	Jumlah	100,00

Sumber : BPS Provinsi Riau Dalam Angka Tahun 2020

Dari table diatas terlihat bahwa penduduk Provinsi Riau terutama berkerja pada sektor Pertanian sebesar 44,70% dan diikuti oleh persentsen

yang terendah adalah listrik, air dan gas sebesar 0,30% namun cukup berarti bagi masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat digunakan dan dilihat dari pendapatan penduduk daerah tersebut begitu juga dengan mata pencarian yang ia geluti.

B. Gambaran Umum Kecamatan Rumbai

Kecamatan Rumbai merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 50 RW dan 205 RT. Luas wilayah Kecamatan Rumbai adalah 128,85 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Umban Sari : 8,68 km²
- b. Kelurahan Rumbai Bukit : 28,97 km²
- c. Kelurahan Muara Fajar : 48,29 km²
- d. Kelurahan Palas : 34,32 km²
- e. Kelurahan Sri Meranti : 8,59 km²

Batas-batas wilayah Kecamatan Rumbai adalah:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Payung Sekaki

Jumlah penduduk Kecamatan Rumbai mencapai 71.200 jiwa pada tahun 2016. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,04 persen dari tahun 2015.

Kepadatan penduduknya mencapai 553 jiwa/km², dengan kelurahan terpadat adalah Sri Meranti sebesar 2.646 jiwa/km².

C. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Sebagai daerah otonom baru, Kota Pekanbaru terus menerus memacu pembangunan disegala bidang, hal ini dilakukan untuk mensejajarkan posisi dengan daerah-daerah lain yang telah terlebih dahulu terbentuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pekanbaru. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan, wilayah pesisir;
- d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pengujian dan pengawasan mutu perikanan;
- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota;

- g. pelaksanaan pelayanan umum sesuai kewenangannya;
- h. penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan lintas kabupaten/ kota;
- i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Adapun visi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau yaitu :“ Mewujudkan Kelautan Dan Perikanan Yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, Berbudaya Menuju Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera”. Sedangkan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau yaitu :

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
3. Meningkatkan dan Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan Perikanan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
2. Optimalnya Produksi Perikanan Tangkap
3. Meningkatnya Kualitas Kelompok Masyarakat Pesisir
4. Meningkatnya Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Tawar

5. Kelompok Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Yang Mandiri Dan Sejahtera

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan. Adapun strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Strategi
 - a. Pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan kawasan kelautan dan perikanan
 - b. Penguatan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Iptek Dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Kebijakan
 - a. Pengembangan perikanan budidaya secara terintegrasi berbasis kawasan
 - b. Optimalisasi produksi dan produktivitas nelayan, sarana dan prasarana perikanan tangkap secara terpadu dan berkelanjutan
 - c. Percepatan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pemberdayaan potensi ekonomi kawasan pantai selata
 - d. Pengembangan budaya maritim dan penyiapan Sumber Daya Manusia kelautan yang berkualitas

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan. Sedangkan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan
- b. Penyelenggraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut dapat dilihat uraian jabatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, antara lain :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang perikanan dengan mempelajari program kerja tahun lalu meliputi : perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan untuk pedoman kerja selama satu tahun;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan dengan menyusun konsep juklak dan juknis di bidang perikanan untuk menjadi peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
- c. membina, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan.;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya

dan usaha perikanan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- e. pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perikanan; tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan;
- f. fasilitasi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan.
- g. penyelenggara kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan;
- h. penyelenggara pemantauan dan evaluasi kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan;
- i. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum, hukum, organisasi dan kehumasan serta rumah tangga dinas;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan dengan merencanakan, melaksanakan, memfasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang program, ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, dan keuangan guna mendukung kelancaran tugas dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. mengonsep program kerja dinas dengan mengkoordinir konsep program kerja masing-masing bidang;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis dinas dengan mengonsep petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional bidang perikanan;
- c. mengkoordinasikan urusap program dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas-tugas kedinasan maupun tugas pemerintah daerah bidang perikanan;
- d. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan serta pelayanan pimpinan;
- e. mengarahkan pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan, pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, gedung dan lingkungan, keamanan dan sarana prasarana rumah tangga dinas;
- f. mengarahkan administrasi dan manajemen kepegawaian dengan pelaksanaan urusan kenaikan pangkat, gaji berkala, jabatan, cuti, kesejahteraan pegawai, disiplin pegawai, penilaian kinerja, mutasi, urusan umum kepegawaian dan pemberhentian pegawai;
- g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dengan administrasi dan pertanggungjawaban anggaran, pembukuan dan akuntansi serta penataan usaha keuangan verifikasi anggaran, pertanggungjawaban serta program dan laporan keuangan.

3. Sub Bagian Ketatausahaan

Kepala Sub Bagian Ketatausahaan mempunyai tugas :

- a. menyusun konsep program kerja dan anggaran Sub Bagian Ketatausahaan

- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi, dinas terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian melakukan pelayanan dan usul serta proses kenaikan pangkat, disiplin pegawai, pendidikan dan pelaporan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtangaan meliputi pengelolaan aset, penyiapan prasarana kantor, penyediaan bahan dan prasarana rapat-rapat dan perawatan gedung dan sarana rumah tangga;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi dan manajemen urusan hukum sebagai bahan pendukung kebijakan kedinasan;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi manajemen urusan kehumasan dan keorganisasian sebagai bahan pendukung kebijakan kedinasan;
- g. mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan secara lisan maupun tertulis
- k. melaporkan pelaksanaan tugas b.dang umum dan kepegawaian kepada atasan baik secara lisan/tertulis;
- l. melaksanakan Tugas lain yang diberikan atasan langsung yang berhubungan dengan bidang pekerjaan.

4. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas :

- a. mengonsepsi program kerja bidang perikanan dengan mengkoordinir program kerja bidang-bidang;

- b. menyusun bahan kebijakan teknis bidang perikanan dengan mengkajiregulasi dan mengonsep juklak juknis;
- c. mengonsep RKA/DPA Dinas Perikanan dengan mengkoordinir program kerjabidang-bidang;
- d. mengonsep perubahan anggaran dengan mengkoordinir program kerjabidang-bidang;
- e. mengonsep Renstra Dinas Perikanan dengan mengkaji laporan dan renstratahun lalu;
- f. menyelia pelaksanaan pendataan program bidang sosial untuk disesuaikan dengan KUA;
- g. mengonsep laporan bulanan Dinas Perikanan dengan mengkoordinir bahan dari bidang-bidang dan mengonsep laporan;
- h. mengonsep laporan tahunan Dinas Perikanan dengan mengkoordinir bahan dari bidang-bidang dan mengonsep laporan,
- i. mengonsep LKPJ dengan mengkoordinir bahan dari bidang-bidang dan mengonsep LAKIP;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung yang berhubungan dengan bidang pekerjaan.

5. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang
- b. pengelolaan sumber daya ikan;
- c. standardisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan sertifikasi awak kapal perikanan;
- d. pengelolaan pelabuhan perikanan dan atau pangkalan pendaratan ikan;
- e. pengendalian usaha penangkapan ikan;
- f. pembinaan kenelayanan;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Tangkap;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan

Kepala Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan mempunyai tugas :

- a. menginventarisir potensi dan penataan perikanan tangkap;
- b. melaksanakan penataan dan mengkoordinasikan upaya perikanan tangkap;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan di bidang sumber daya ikan di perairan umum dan perairan laut teritorial;
- d. melaksanakan bimbingan teknis di bidang sumber daya ikan perairan umum dan perairan laut teritorial;
- e. melaksanakan mengidentifikasi dan monitoring dan evaluasi serta

laporan pengelolaan sumber daya ikan di perairan umum dan perairan laut teritorial;

- f. melaksanakan pengelolaan di perairan umum guna kelestarian sumber daya ikan;
- g. melaksanakan data Log Book perikanan tangkap;
- h. melaksanakan monitoring, pengumpulan dan penyusunan data statistik perikanan;
- i. melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan di perairan laut teritorial Wilayah Pengelolaan Perikanan yang menjadi kewenangan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dengan bidang pekerjaan.

7. Seksi Kenelayanan

Kepala Seksi Kenelayanan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengolah, menganalisa kegiatan yang berhubungan dengan kenelayanan;
- b. melakukan identifikasi dan klarifikasi nelayan;
- c. melakukan penguatan kelembagaan kelompok dan fasilitas kemitraan usaha serta pengembangan usaha nelayan;
- d. melakukan pembinaan pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan;
- e. melakukan pembinaan sentra-sentra nelayan;
- f. membantu Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam berkoordinasi dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung yang berhubungan dengan bidang pekerjaan.

8. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan

Kepala Seksi Pengendalian Penangkapan ikan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengolah, menganalisa serta melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan ikan;
- b. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi sesuai bidang tugas pokok Seksi Pengendalianangkapan Ikan;
- c. melaksanakan penegakan regulasi perikanan tangkap;
- d. melaksanakan pengendalian perizinan usaha perikanan tangkap;
- e. melaksanakan penyediaan dan pengendalian sarana dan prasarana Penangkapan ikan;
- f. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahanpenyempurnaannya;
- g. membantu Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam berkoordinasi denganInstansi terkait;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung yang berhubungandengan bidang pekerjaan.

9. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan program dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program dalam rangka

peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, peningkatan kapasitas dan kualitas perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, pengembangan kawasan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pakan ikan, perizinan perikanan budidaya, serta peningkatan usaha budidaya;

- b. penyusunan standard, prosedur dan kriteria dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, peningkatan kapasitas dan kualitas perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, pengembangan kawasan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pakan ikan, perizinan perikanan budidaya, serta peningkatan usahabudidaya;
- c. pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, pengembangan kawasan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pakan ikan, perizinan perikanan budidaya, serta peningkatan usahabudidaya;
- d. pembinaan, pengawasan, koordinasi, promosi dan melaksanakan pelayanan teknis kepada instansi terkait dan pelaku usaha dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya;

- f. pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Budidaya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Diri;

10. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya

Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan pelaksanaan kegiatan budidayadan perbenihan ikan cair, air payau, dan laut, pengembangan usaha, pelayanan usaha, pakan ikan, standarisasi dan sertifikasi, perizinan perikanan budidaya serta data dan statistik perikanan budidaya.
- b. menyusun standar, prosedur, dan kriteria kegiatan budidaya dan perbenihan iakn air tawar, air payau dan laut, pengembangan usaha, pelayanan usaha, pakan ikan, standarisasi dan sertifikasi, perizinan perikanan budidaya serta data dan statistik perikanan budaya
- c. melaksanakan bimbingan teknis budidaya dan perbenihan ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan usaha, pelayanan usaha, pakan ikan, standarisasi, dan sertifiaksi, perizinan perikanan budidaya serta data dan stastistik perikanan budidaya;
- d. membina, koordinasi dan melaksanakan pelayanan teknis budidaya dan perbenihan ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan usaha, pelayanan usaha, pakan ikan, standarisasi dan sertifikasi, pakan ikan, perizinan perikanan budidaya serta data stastistik perikanan budidaya;
- e. melaksanakan promosi perikanan budidaya tingkat daerah dan nasional;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusun laporan produksi ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan usaha, pelayanan usaha,

payan ikan, standarisasi dan sertifikasi, perizinan perikanan budidaya serta data dan stastisik perikanan budidaya;

- g. melaksanakan administrasi di Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung yang berhubungan dengan bidang pekerjaan.

11. Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air, perencanaan dan pemantauan pembangunan kawasan perikanan budidaya, operasional dan pemeliharaan kawasan perikanan budidaya, pemanfaatan fasilitas kawasan perikanan budidaya, penataan dan peningkatan minapolitan budidaya;
- b. menyusun standar, prosedur, dan kriteria pada kegiatan identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air, perencanaan dan pemantauan pembangunan kawasan perikanan budidaya, operasional dan pemeliharaan kawasan perikanan budidaya, pemanfaatan fasilitas kawasan perikanan budidaya, penataan dan peningkatan minapolitan budidaya;
- c. melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air, perencanaan dan pemantauan pembangunan kawasan perikanan budidaya, operasional dan pemeliharaan kawasan perikanan budidaya, pemanfaatan fasilitas kawasan perikanan budidaya, penataan dan peningkatan minapolitan budidaya;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan

identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air, perencanaan dan pemantauan pembangunan kawasan perikanan budidaya, operasional dan pemeliharaan kawasan perikanan budidaya, pemanfaatan fasilitas kawasan perikanan budidaya, penataan dan peningkatan minapolitan budidaya;

- e. membina, koordinasi dan melaksanakan pelayanan teknis kegiatan identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air, perencanaan dan pemantauan pembangunan kawasan perikanan budidaya, operasional dan pemeliharaan kawasan perikanan budidaya, pemanfaatan fasilitas kawasan perikanan budidaya, penataan dan peningkatan minapolitan budidaya;
- f. melaksanakan administrasi di Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung yang berhubungan dengan bidang pekerjaan.

12. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan pelaksanaan kegiatan hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, perlindungan lingkungan budidaya, standardisasi laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan. perikanan budidaya;
- b. menyusun standar, prosedur, dan kriteria kegiatan hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, perlindungan lingkungan budidaya, standardisasi laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya;
- c. melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, perlindungan lingkungan budidaya, standardisasi

laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya;

- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, perlindungan lingkungan budidaya, standardisasi laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya;
- e. membina, koordinasi dan melaksanakan pelayanan teknis pengendalian hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, perlindungan lingkungan budidaya, dan standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya;
- f. melaksanakan administrasi di Seksi Kesehatan Ikan dan lingkungan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung yang berhubungan dengan bidang pekerjaan.

13. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Usaha dan Kelembagaan, Seksi Pembinaan Mutu Produk dan Seksi Pemasaran dan Promosi. Untuk melaksanakan tugas, kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Usaha dan Kelembagaan, Seksi Pembinaan Mutu Produk dan Seksi Pemasaran dan Promosi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Usaha dan Kelembagaan, Seksi Pembinaan

Mutu Produk dan Seksi Pemasaran dan Promosi;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Usaha dan Kelembagaan, Seksi Pembinaan Mutu Produk dan Seksi Pemasaran dan Promosi
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan administrasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

14. Seksi Usaha dan Kelembagaan

Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. melakukan pendataan pelaku usaha di bidang pengolahan produk perikanan;
- b. melaksanakan pembinaan berusaha kepada kelompok pengolahan hasil perikanan;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kelompok usaha pengolahan perikanan;
- d. pembinaan keberlanjutan usaha perikanan;
- e. memfasilitasi penerbitan dokumen pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
- f. mendorong peningkatan skala usaha yang dilaksanakan kelompok pengolahan hasil perikanan kelautan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung yang

berhubungan dengan bidang pekerjaan.

15. Seksi Pemasaran dan Promosi

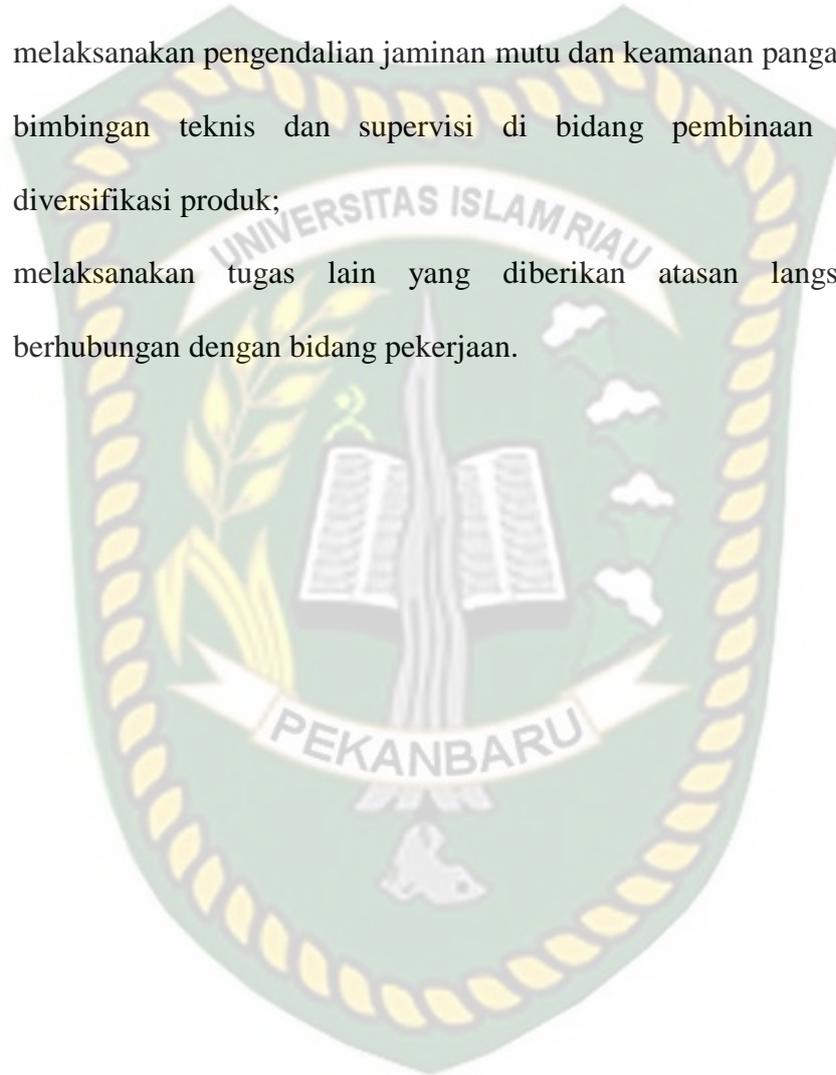
Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai rincian tugas :
memfasilitasi pemasaran produk ke pihak ketiga;

- a. melaksanakan pendataan berkaitan dengan produk perikanan dan perkembangan harga;
- b. melaksanakan identifikasi distribusi jalur pemasaran hasil perikanan;
- c. menyebarluaskan informasi harga produk perikanan kepada produsen, konsumen, dan instansi terkait;
- d. melaksanakan kegiatan promosi hasil perikanan melalui bazar dan pameran;
- e. penguatan promosi dan produk perikanan;
- f. melaksanakan pemantauan kegiatan pelelangan hasil-hasil perikanan dan kelautan pada institusi pemasaran;
- g. peningkatan sistem logistik produk perikanan;
- h. melaksanakan pendataan perdagangan komoditas perikanan yang diawasi seperti labi-labi, ikan arwana, ikan napoleon, dsb;
- i. melakukan pencatatan perkembangan produksi perikanan perkembangan harga pasar, dan harga hasil-hasil perikanan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung yang berhubungan dengan bidang pekerjaan.

16. Seksi Pembinaan Mutu Produk

Kepala Seksi Pembinaan Mutu Produk mempunyai tugas :

- a. melakukan bimbingan teknis peningkatan hasil olahan perikanan;
- b. melakukan bimbingan teknis pengembang produk;
- c. melakukan pengawasan mutu produk hasil perikan dan kelautan;
- d. melaksanakan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan;
- e. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung yang berhubungan dengan bidang pekerjaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan BAB V ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari para responden. Oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan para responden. Adapun identitas responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Umur Responden

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Adapun tingkat umur responden pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.1 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 20 tahun	9	18
2.	21-30 tahun	25	50
3.	31-40 tahun	13	26
4.	> 41 tahun	3	6
Jumlah		50	100

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden berada pada tingkat umur 21-40 tahun yakni sebanyak 25 orang atau 50% dan yang paling sedikit responden yang berusia < 41 tahun berjumlah 3 orang responden pada klasifikasi umur tersebut. Berdasarkan data tersebut diatas, mayoritas responden berada pada tingkat umur 31-40 tahun.

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivita kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain.

2. Jenis Kelamin

Berikut ini diuraikan mengenai responden pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau berdasarkan jenis kelamin.

Tabel V.2 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	39	78
2.	Perempuan	11	22
Jumlah		50	100

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel V.2 dapat dilihat jumlah responden laki-laki sebanyak 39 orang atau 78%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 11 atau 22%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden adalah laki-laki.

Selain umur, jenis kelamin juga dapat berpengaruh dari pekerjaan yang diberikan. Pada umumnya pekerjaan laki-laki lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan perempuan. Tetapi sebagian perusahaan atau instansi mempekerjakan seseorang bukan dilihat dari jenis kelamin tetapi lebih dari kemampuan dan pendidikan yang dimiliki pegawai tersebut.

B. Analisis Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau

Pemberdayaan pasti berkaitan dengan pembangunan, pembangunan sejak beberapa terakhir ini banyak di perbincangkan oleh beragam kalangan, baik aparat birokrasi, politisi, akademi, dan praktisi serta kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dan berkepentingan dengan upaya perbaikan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Maka dari itu pemerintah membuat program pemberdayaan bagi masyarakat agar terciptanya masyarakat yang mandiri.

Pemberdayaan dikenal sejak tahun 1990-an melalui program IDT (Ipres desa tertinggal).pemberdayaan telah menjadi program nasional melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Sehingga tidak satupun SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang tidak memiliki program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan utama administrasi adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban agar masyarakat bisa menjalani kehidupan secara teratur. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok dan fungsi yang mencakup tujuan pelayanan yaitu: mengawasi produksi perikanan, mengadakan pembinaan kepada petani ikan, memberdayakan hasil tangkapan ikan.

Dari peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Riau, maka patutnya kita sama-sama melaksanakan apa yang seharusnya yang akan kita lakukan dalam pemberdayaan petani ikan di Provinsi Riau. Karena masih ada petani ikan tidak mendapatkan pelatihan sehingga minimnya pengetahuan petani-petani tersebut.

Dilihat dari sektor pertanian, Riau merupakan penghasil ikan yang memenuhi kebutuhan pasar di Pekanbaru. Baik ikan laut, ikan sungai, maupun ikan budidaya. Maka dari itu pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau sangat di perlukan mengingat kebutuhan konsumsi ikan semakin tinggi, karena tingginya minat masyarakat Provinsi Riau untuk mengkonsumsi ikan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, disamping ekonomis, nilai protein yang dimiliki ikan sangatlah tinggi,

sehingga baik untuk tumbuh di konsumsi. Untuk itu semakin banyaknya petani ikan, maka semakin tercukupinya kebutuhan masyarakat.

Namun segala hal mengenai pemberdayaan bukanlah segampang apa yang kita pikirkan, petani yang ada di kecamatan rumbai pesisir masih banyak yang kurang pengetahuan dikarenakan kurangnya materi yang di berikan oleh pemerintah. Dampaknya petani hanya bisa belajar dari beberapa petani yang sudah berpengalaman. Sebagai pemerintah yang mengadakan program pemberdayaan yang bertujuan untuk membangun masyarakat kecil untuk bisa mengelola usaha dibidang perikanan agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan pembangunan berkelanjutan untuk rumah tangga daerahnya sendiri.

Sekiranya agar terciptanya masyarakat yang mandiri pemerintah haruslah melakukan pengawasan, pembinaan materi, dan menyediakan sarana dan prasarana bagi petani ikan agar program pemberdayaan ini bisa menjadi maksimal untuk kedepannya.

1. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi kegiatan maksudnya yaitu di Kecamatan Rumbai Pesisir apakah ada penyuluhan-penyuluhan dari pemerintahan desa mengenai program-program yang akan dijalankan di desa tersebut. Sosialisasi melalui media masa untuk memberi informasi kepada masyarakat yaitu seharusnya untuk menginformasikan kepada masyarakat desa, pemerintahan desa seharusnya membuat pengumuman melalui media masa agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Melalui pertemuan musrenbang guna membahas mengenai pembangunan di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu setiap perencanaan yang akan

dijalankan di Kecamatan Rumbai Pesisir seharusnya terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama mengenai perencanaan pembangunan baik fisik dan non fisik.

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai indikator sosialisasi kegiatan dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Indikator Sosialisasi Kegiatan dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Sosialisasi melalui media masa untuk memberi informasi kepada masyarakat.	11 (22%)	31 (62%)	8 (16%)	50 (100%)
2.	Pentingnya sosialisasi pemberdayaan	10 (20%)	31 (62%)	9 (18%)	50 (100%)
Jumlah		22	62	17	100
Rata-rata		11	31	8	50
Persentase		22%	62%	16%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden mengenai indikator sosialisasi kegiatan dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau, sebagian besar responden menyatakan baik sebanyak 11 orang (22%) responden menyatakan baik karena responden bertanggung masih ada perhatian pegawai dalam memberikan informasi terakit program pemberdayaan yang akan diberikan

kepada petani ikan patin sehingga banyak memperoleh pengetahuan. Sedangkan yang menyatakan cukup baik sebanyak 31 orang (62%) Banyaknya hasil tanggapan responden yang menyatakan cukup baik karena responden bertanggung perhatian pegawai terhadap keperluan masyarakat atau masyarakat yang mau mengikuti program pemberdayaan kurang baik dan masyarakat merasa jika ada memiliki hubungan kekerabatan maka lebih didahulukan sehingga pegawai bersikap tidak adil dalam memberikan informasi. Masyarakat selalu berkeinginan untuk dihargai serta dilayani dengan baik karena ini juga merupakan kewajiban pegawai sebagai bentuk pelayananan. Dan yang menyatakan tidak baik sebanyak 8 orang (16%) karena masih ada responden yang beranggapan tidak ada keadilan yang diberi pegawai dalam memberikan informasi mengenai sosialisasi yang akan dilakukan sehingga tidak semua masyarakat yang mengikuti program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau Bapak Herman pada tanggal 26 Agustus 2021, “menyatakan bahwa program sosialisasi ini sudah memang ketentuan dari pusat yang memberikan sehingga dilakukan sesuai dengan ketentuan, dan dari pihak dinas memberitahukan kepada pihak kepala desa untuk memberikan informasi kepada petani ikan patin tersebut. Namun jika tidak banyak yang mengikuti sosialisasi tersebut mungkin kurangnya penyampain yang diberikan pihak desa kepada petani tersebut”.

Dari hasil tanggapan responden dan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator sosialisasi kegiatan dalam Pemberdayaan Petani

Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau dalam kategori cukup baik sebanyak 31 orang (62%).

Berdasarkan hasil observasi masih ditemukan bahwa pihak UPT dalam memberikan sosialisasi sudah dilakukan secara efektif, kendalanya hanya penyampaian informasi yang diterima petani ikan patin yang kurang jelas sehingga tidak semua petani yang ikut program sosialisasi ini.

2. Penayadaran Masyarakat

Penayadaran Masyarakat maksudnya yaitu sebelum menjalankan program-program maka pemerintahan desa harus bisa memberikan dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa arti penting ke ikut sertaan masyarakat dan pembangunan desa. Pemangku kepentingan membuat pertemuan kepada masyarakat maksudnya bahwa perangkat desa harus mampu melakukan pertemuan dan pendekatan kepada masyarakat agar mereka mau ikut serta dalam pembangunan, guna membahas pemberdayaan masyarakat maksudnya perangkat desa harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan-perencanaan program pembangunan. Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai indikator penayadaran masyarakat dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.5. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Indikator Penyadaran Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Pemangku kepentingan membuat pertemuan dengan masyarakat .	10 (20%)	31 (62%)	9 (18%)	50 (100%)
2.	Memberikan pelatihan untuk memperbaiki sumber daya manusia di Kecamatan Rumbai Pesisir	7 (14%)	34 (68%)	9 (18%)	50 (100%)
Jumlah		17	65	18	100
Rata-rata		9	32	9	50
Persentase		18%	64%	18%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden mengenai indikator penyadaran masyarakat dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau, sebagian besar responden menyatakan baik sebanyak 9 orang (18%) karena masih ada masyarakat yang bertanggung bahwa pelatihan dan musyawarah yang dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi penambahan pengetahuan untuk petani ikan patin dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan yang menyatakan cukup baik sebanyak 32 orang (64%). Banyaknya hasil tanggapan responden yang menyatakan cukup baik karena responden bertanggung bahwa pelatihan yang diadakan ini kurang aktif dan hanya dilakukan tidak rutin sehingga banyak kendala petani ikan patin yang masih ditemui dalam pengembangan usahanya dan

pertemuan yang dilakukan oleh pihak desa juga efektif. Dan yang menyatakan tidak baik sebanyak 9 orang (18%) karena masih ada responden yang bertanggung bahwa pelatihan yang diberikan ini tidak dilakukan secara rutin dan informasi yang diperoleh dari pelatihan tersebut juga kurang jelas dengan alasan bahwa tenaga pelatih yang datang juga kurang banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau Bapak Herman pada tanggal 26 Agustus 2021, “menyatakan bahwa kami sebagai pihak UPT yang diwakilkan untuk memberikan pelatihan sehingga kami yang datang juga sudah menjadi prosedurnya dan sudah menjadi ketentuan. Kami memberikan pelatihan secara berkala dan tidak bisa ditentukan waktunya karena sesuai kebutuhan dan program yang dijalankan petani ikan patin ini”.

Dari hasil tanggapan responden dan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator penyadaran masyarakat dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau dalam kategori cukup baik sebanyak 32 orang (64%).

Berdasarkan hasil observasi maka masih ada dijumpai beberapa orang petani yang tidak mengikuti program pelatihan dan musyawarah sehingga dapat diketahui petani ikan tersebut. Sedangkan dari program pelatihan inilah petani dapat memperoleh pengetahuan dan dapat mempraktekannya untuk pengembangan usaha ikan patin tersebut.

3. Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat maksudnya yaitu sebaiknya di Kecamatan Rumbai Pesisir dibuat organisasi-organisasi masyarakat seperti karang taruna

remaja agar sebagai pelopor setiap kegiatan. Kepala pemerintahan desa membuat organisasi remaja guna meningkatkan kreatifitas masyarakat maksudnya yaitu keaktifan remaja dimunculkan agar remaja lebih mampu berorganisasi lebih dini. Masyarakat ikut berperan aktif terhadap perkembangan pemberdayaan sumber-sumber daya guna ada di Kecamatan Rumbai Pesisir. Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai indikator pengorganisasian masyarakat dalam Pemberdayaan Pengolahan Ikan Patin Pasca Panen oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.7. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Indikator Pengorganisasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Desa membuat organisasi remaja guna meningkatkan kreatifitas masyarakat.	8 (16%)	33 (66%)	9 (18%)	50 (100%)
2.	Masyarakat ikut berperan aktif terhadap perkembangan pemberdayaan sumber-sumber daya	10 (20%)	33 (66%)	7 (14%)	50 (100%)
Jumlah		18	66	17	100
Rata-rata		9	33	8	50
Persentase		18%	66%	16%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden mengenai indikator pengorganisasian masyarakat dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau, sebagian besar responden menyatakan baik sebanyak 9 orang (18%) karena

masih ada masyarakat yang bertanggung banyak dampak positif dengan mengajak serta remaja dalam program pemberdayaan ini sehingga dapat menjadi bekal ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk masa yang akan datang. Sedangkan yang menyatakan cukup baik sebanyak 33 orang (66%), banyaknya hasil tanggapan responden yang menyatakan cukup baik karena responden bertanggung terkadang remaja ini kurang mau diajak untuk mengikuti program pemberdayaan ini dengan alasan bahwa program ini hanya untuk orangtua dan tidak dapat dimengerti. Dan yang menyatakan tidak baik sebanyak 8 orang (16%), masih ada tanggapan responden yang menyatakan tidak baik karena masih ada masyarakat yang menganggap bahwa program pemberdayaan ini tidak penting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai Kepala Kecamatan Rumbai Pesisir, “menyatakan bahwa kami sebagai pihak desa sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya dalam membentuk musyawarah atau rapat bagi petani ikan patin atau masyarakat yang tertarik untuk mengikuti program pemberdayaan ini. Dan apabila masyarakat yang tidak mau mengikuti program pemberdayaan ini maka itu kehendak dari masyarakat tersebut karena itu semua untuk kepentingan pengetahuan mereka juga”.

Dari hasil tanggapan responden dan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator pengorganisasian masyarakat dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau dalam kategori cukup baik sebanyak 33 orang (66%).

Berdasarkan hasil observasi masih ditemukan masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti program pemberdayaan ini karena tidak semua masyarakat

yang memiliki potensi untuk menjadi petani ikan patin sehingga banyak masyarakat yang kurang tertarik untuk mengikuti program ini. Seharusnya selain memberikan sosialisasi dan pelatihan, pihak UPT maupun pemerintah daerah setempat juga memberikan bantuan bagi masyarakat lainnya untuk dapat mengikuti pengembangan usaha pengolahn ikan patin ini.

4. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan maksudnya adalah membuat rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan, dan perangkat desa berusaha menjalankan program yang direncanakan melalui musrenbang. Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai indikator perencanaan pembangunan desa dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.9. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Indikator Perencanaan Pembangunan dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Melalui pertemuan musrenbang membahas mengenai pembangunan di Kecamatan Rumbai Pesisir.	11 (22%)	33 (66%)	6 (12%)	50 (100%)
2.	Kerjasama dalam pembangunan Desa	7 (14%)	34 (68%)	9 (18%)	50 (100%)
Jumlah		18	67	15	100
Rata-rata		9	33	8	50
Persentase		18%	66%	16%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden mengenai indikator perencanaan pembangunan desa dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau, sebagian besar responden menyatakan baik sebanyak 9 orang (18%), karena ada responden yang bertanggung bahwa pentingnya pembangunan desa ini dilakukan sehingga harus bersama-sama untuk membangun desa. Sedangkan yang menyatakan cukup baik sebanyak 33 orang (66%), banyaknya hasil tanggapan responden yang menyatakan cukup baik karena responden bertanggung bahwa banyak masyarakat yang kurang aktif untuk mengikuti musrembang yang berdampak pada perencanaan pembangunan desa. Dan yang menyatakan tidak baik sebanyak 8 orang (16%) karena masih ada responden yang bertanggung bahwa kegiatan musrembang yang dilakukan ini tidak banyak yang mengikuti dengan alasan banyak pekerjaan yang dilakukan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau Bapak Herman pada tanggal 26 Agustus 2021, “menyatakan bahwa melalui musrembang dan bantuan dari pihak kepala desa dan masyarakat maka kita dapat membangun desa agar lebih maju lagi dan mewujudkan program pemberdayaan ini dan usaha masyarakat menjadi berkembang”.

Dari hasil tanggapan responden dan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator perencanaan pembangunan desa dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau dalam kategori cukup baik sebanyak 33 orang (66%).

Berdasarkan hasil observasi masih ada ditemukan masyarakat yang kurang aktif mengikuti musrembang dan program pemberdayaan yang akan dilakukan. Jika hal ini terus terjadi maka desa tidak akan berkembang dan program yang telah ditetapkan tidak akan berjalan dengan lancar dan berhasil.

5. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan maksudnya yaitu perangkat desa sebaiknya berusaha untuk meralisasikan program-program yang direncanakan. Membuat pelatihan-pelatihan kepada masyarakat supaya terjalin hubungan yang baik antar pemerintah dan masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rumbai Pesisir maksudnya yaitu jalinan hubungan yang baik akan menimbulkan dampak positif juga dan juga akan berdampak kepada masyarakat. Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai indikator pelaksanaan kegiatan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.11. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Indikator Pelaksanaan Kegiatan dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	Merealisasikan perencanaan	11 (22%)	31 (62%)	8 (16%)	50 (100%)
2.	Membuat pelatihan	10 (20%)	31 (62%)	9 (18%)	50 (100%)
Jumlah		21	62	17	100
Rata-rata		10	31	9	50
Persentase		20%	62%	18%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden mengenai indikator pelaksanaan kegiatan dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau, sebagian besar responden menyatakan baik sebanyak 10 orang (20%) karena masih ada responden yang bertanggung bahwa karena pelatihan yang dibeikan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pembangunan dan program pemberdayaan yang dilakukan. Sedangkan yang menyatakan cukup baik sebanyak 31 orang (62%), banyaknya hasil tanggapan responden yang menyatakan cukup baik karena responden bertanggung tidak semua program pelatihan yang dilakukan dapat terealisasi karena terkendala olehg dana dan kemampuan masyarakat yang tidak dapat mengembangkan usaha pengolahan ikan patin ini. Dan yang menyatakan tidak baik sebanyak 9 orang (18%), karena masih ada responden yang bertanggung bahwa pelatihan yang dilakukan tidak dapat berdampak apa-apa terkecuali juga diberikan bantuan baik dana maupun sarana dan prasaran pendukung dalam pengembangan usaha pengolahan ikan patin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai Kepala Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten pada tanggal 27 Agustus 2021, “menyatakan bahwa pelatihan yang kami berikan ini memang sudah ketentuan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha perikanan air tawar. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang kurang aktif untuk mengikuti pelatihan dengan alasan bahwa tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya makanya tidak ingin mengikuti pelatihan”.

Dari hasil tanggapan responden dan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator pelaksanaan kegiatan dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau dalam kategori cukup baik sebanyak 31 orang (62%).

Berdasarkan hasil observasi masih ditemukan bahwa pelatihan yang diberikan oleh pihak UPT sudah berjalan dengan efektif akan tetapi ada beberapa masyarakat yang kurang aktif untuk mengikuti pelatihan tersebut dengan alasan tidak mau mengembangkan usahanya karena terkendala dengan dana untuk modal pengembangan usaha perikananannya.

Untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.13. Rekapitulasi hasil tanggapan responden mengenai Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau

No.	Indikator Variabel	Rekapitulasi
1.	Sosialisasi Kegiatan	65.67%
2.	Penyadaraan Masyarakat	66.33%
3.	Pengorganisasian Masyarakat	67.33%
4.	Perencanaan Pembangunan	67.67%
5.	Pelaksanaan Keegiatan	68%
Rata-rata		67
Persentase		67%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil tanggapan responden tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan petani ikan Kecamatan Rumbai Pesisir

Provinsi Riau oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dapat disimpulkan tanggapan responden dalam kategori cukup baik. Artinya bahwa program pemberdayaan pengolahan ikan belum dilakukan secara optimal dengan alasan bahwa tidak terlalu banyak minat masyarakat untuk mengikuti program ini karena kekurangan modal untuk mengembangkan usaha perikananannya.

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau

Telah di ketahui sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pemerintah terhadap Petani Ikan Kolam di Kecamatan Rumbai Pesisir Provinsi Riau dalam mengembangkan potensinya. Setelah penulis melakukan serangkaian kegiatan berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan terhadap petani ikan kolam oleh Pemerintah Provinsi Riau (studi kasus Kecamatan Rumbai Pesisir).

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat pengawasan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran pendanaan dari pemerintah (APBD).
2. Keterbatasan jumlah pegawai penyuluh (fungsional) Dinas Perikanan.
3. Iklim usaha yang belum maksimal.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana.
5. Sumber Daya Manusia.

Faktor terpenting dalam melakukan koordinasi adalah adanya sumber daya manusia. Untuk kelancaran suatu koordinasi dibutuhkan manusia yang produktif, serta kemampuan manusianya yang handal sebagai pengelola yang profesional dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pelaksanaan. Eteika pemerintahan menjadi salah satu tonggak dasar dalam mewujudkan prilaku dan tindakan aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat, yang kemudian menciptakan sumber daya manusia yang bagus. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan palatihan agar dalam tugasnya mampu dan dapat dirasakan baik oleh masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan pengembangan produksi ikan kolam, Dinas Perikanan Provinsi Riau mengalami berbagai kendala yang akan berdampak tidak maksimalnya pelaksanaan itu dilakukan, salah satunya sumber daya manusia yang tidak memadai, seperti kurangnya kinerja tim pengawas dari Dinas Perikanan Provinsi Riau dalam memberikan pembinaan dan pengawasan. Mengenai faktorfaktor apa saja yang menghambat pengembangan Potensi perikanan di Kecamatan Rumbai Pesisir adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor terpenting dalam melaksanakan koordinasi adalah adanya sumber daya manusia. Untuk kelancaran suatu koordinasi dibutuhkan manusia yang produktif, serta kemampuan manusianya yang handal sebagai pengelola yang profesional dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pengelolaan perikanan.

Terkait bidang budidaya perikanan, baik menggunakan APBD Pelalawan maupun bantuan APBN, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan telah memprogramkan pengembangan budidaya ikan berupa peningkatan sarana produksi bagi wirausaha perikanan. Setidaknya dalam program ini sebanyak 8 kelompok mendapatkan bantuan berupa bantuan pakan ikan dan benih ikan.

Pemerintah menjadi salah satu dasar dalam mewujudkan perilaku dan tindakan aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, yang kemudian menciptakan sumber daya manusia yang bagus di Kecamatan Rumbai Pesisir Provinsi Riau dalam mengelolah usaha perikanan. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan agar dalam pengembanagn itu, petani mampu melakukan pengelolaan secara optimal di Kecamatan Rumbai Pesisir Provinsi Riau.

2. Faktor Regulasi (aturan)

Di dalam menjalankan tugas dan menata kehidupan masyarakat sudah barang tentu adanya peraturan atau regulasi yang mampu mengatur dan menjadi pedoman, untuk itu hal yang terpenting apakah peraturan tersebut mampu menjawab dan memberikan manfaat yang baik bagi ruang lingkup yang diatur. Seharusnya ada aturan khusus yang menangani permasalahan perikanan. Karena ditakutkan Sewaktu-waktu perubahan akan terjadi disini peran dari regulasi yang di anggap sangat penting untuk senantiasa menjawab perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yakni Dinas Perikanan Provinsi Riau harus mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan, kendala saat ini adalah belum terlaksananya.

3. Faktor Organisatoris

Dalam menjalankan pengelalan dan pengembangan potensi perikanan harus di dukung penuh dengan seluruh aspek-aspek yang terkait didalamnya, jika salah satunya tidak berjalan sebagaimana mestinya akan berdampak pada seluruh proses pengawasan tersebut. Kerja sama yang baik bisa menjadikan Dinas Perikanan menjadi sebuah Organisasi yang bisa berjalan dengan baik dan lancar, disamping itu juga perlu adanya komunikasi yang baik, tanpa adanya kerjasama dan komunikasi yang baik, sebuah organisasi tidak akan bias menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan.

4. Faktor Administratif

Administratif menjadi hal terpenting dalam melayani kebutuhan masyarakat kepada pemerintah, administrative berguna sebagai pendukung untuk memudahkan dan membantu mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Kendala yang terjadi dalam proses pengawasan ini adalah dalam hal pelayanan pengelolaan usaha perikanan di Kecamatan Rumbai Pesisir Provinsi Riau. Administrasi hal yang menjadi ukuran keberhasilan dari sebuah regulasi, tetapi Dinas Perikanan belum bisa efektif dalam melakukan administrasi karna terhambat keterbatasan pegawai yang professional, hal tersebutlah yang menghambat terlaksananya pengawasan terhadap usaha perikanan di Provinsi Riau.

Untuk itu sekiranya aparaturnya pemerintah mengevaluasi tugas-tugas yang telah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau yang telah terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses pelayanan yang secepatnya ada tindakan tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

5. Faktor Anggaran

Anggaran merupakan sesuatu yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan di Kecamatan Rumbai Pesisir, karena pengelolaan bisa berjalan dengan baik apabila ada sumber dana untuk melaksanakan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Salah satu kelemahan yang bisa dilihat saat ini di Dinas Perikanan Provinsi Riau yaitu lemahnya para petugas menyusun anggaran dan memperjuangkan agar anggaran yang diusulkan disetujui oleh pemerintah daerah Provinsi Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan kuisioner dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemberdayaan Petani Ikan Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau kurang terlaksana dengan baik dengan persentase sebesar 67%. Pengawasan Pemerintah yang dilakukan tim Pengawas belum terlaksana dengan baik di Provinsi Riau berdasarkan jawaban dari informan yang diperoleh dari penelitian dilapangan. Keberhasilan Pelaksanaan suatu Program juga dipengaruhi oleh adanya partisipasi dari masyarakat yang ikut mendukung program-program Pemerintah Daerah Provinsi Riau terhadap usaha perikanan tersebut
2. Adapun yang menjadi faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Program pengembangan produksi ikan kolam di Kecamatan Rumbai Pesisir Provinsi Riau :
 - a. Sebagian besar kawasan perikanan di Provinsi Riau belum dimanfaatkan dengan baik karena pengawasan belum begitu efektif
 - b. Dari Dinas Perikanan kurangnya personil pengawas yang diturunkan kelapangan.
 - c. Kurang maksimalnya biaya atau anggaran untuk biaya pengawasan dari pelaksanaan terhadap usah perikanan.

B. Saran

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini penulis akan memberi saran yang dimaksud untuk memberi sumbangsinya masukan akan kedepannya lebih baik. Saran atau rekomendasi yang diberikan diantaranya adalah:

1. Program pembinaan dilaksanakan secara kesinambungan dan menjurus kepada permasalahan yang dihadapi oleh petani ikan kolam misalnya dengan pelaksanaan, hambatan dan permasalahan dapat dipecahkan atau diupayakan jalan keluarnya.
2. Program pengawasan dilaksanakan secara baik dan melakukan secara langsung turun kelapangan kepada petani ikan kolam dengan melihat hasil produksi yang mereka hasilkan dan melihat apakah pembinaan yang dilakukan telah mereka lakukan dengan baik.
3. Kiranya pembinaan yang diberikan atau diprogramkan oleh dinas perikanan yang menyentuh langsung kepada petani ikan kolam misalnya tidak dalam bentuk manajemen tapi dalam bentuk bantuan mesin dan peralatan.
4. Walaupun Provinsi Riau telah dilakukan Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaksanaan kebijakan usaha peningkatan potensi perikanan, dilihat dari realisasinya dilapangan masi terdapat para pengusaha ikan yang belum diperhatikan oleh pemerintah khususnya di Kecamatan Rumbai Pesisir. Diharapkan agar semua instansi terkait baik itu dari Dinas Perikanan, Pemerintah Provinsi Riau, para pengusaha ikan, masyarakat Provinsi Riau

agar lebih meningkatkan dalam membangun usaha perikanan yang maju sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Provinsi Riau. Penulis mengharapkan usaha perikanan di Provinsi Riau tetap optimal dan terus berkembang sesuai dengan visi dan misi Dinas Perikanan yang bertujuan untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perikanan di Provinsi Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-buku

- Affifudin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung, Alfabeta
- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung, Alfabeta.
- Effendi, Sofian, 2013. *Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*.
- Kusdi, 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Munir, Dasril, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yo yakarta. Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)
- Pasalong, Harbani.2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Reksohardiprodjo, Suakanto, 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Edisi Kelima, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2009. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung, CV Mandar Maju.
- Silalahi, Ulber, 2002. *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*. Bandung, Mandar Maju.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Syafiie. Inu Kencana, 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Warsanto, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta. Andi.
- Winardi, J. 2009. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Mardikanto, totok. Dkk. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

b. Dokumentasi

Anuari, Yusuf. 2014. *Peranan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Memberdayakan Nelayan Kecil Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Dikabupaten Rokan Hilir*. Skripsi. UIR

Buku pedoman penulisan edisi revisi, 2013. Pekanbaru, UIR Press.

Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

Undang- Undang No 8 Tahun 2008 Tentang *Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru*.

Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang *Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani*.

Peraturan Daerah No 9 Tahun 2000 Tentang *Perizinan Usaha Perikanan*.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 4190 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

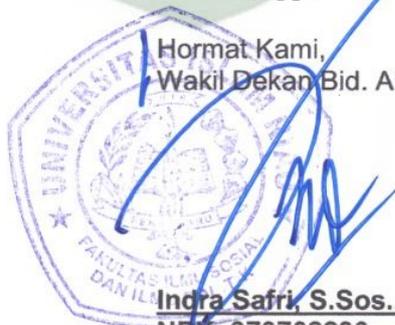
Nama : Aldizan Syahyadin
 NPM : 147310711
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA OLEH DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU (STUDI DI KELURAHAN LEMBAHSARI
 Persentase Plagiasi : 29%
 Jumlah Halaman : 112 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
 Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 November 2021

Hormat Kami,
 Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
 NPK. 970702230